

**RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH
STUDI KASUS DI SMP ISLAM NURUL IHSAN
PALANGKA RAYA**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam (M. Pd)**



OLEH:

**CHAIRUN NI'MAH
NIM: 14013065**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
1437 H/2016 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH STUDI KASUS DI
SMP ISLAM NURUL IHSAN PALANGKA RAYA

Ditulis Oleh : CHAIRUN NI'MAH

NIM : 14013065

Prodi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Palangka Raya, September 2016





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul **RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH
STUDI KASUS DI SMP ISLAM NURUL IHSAN PALANGKA RAYA** Oleh Chairun Ni'mah
NIM 14013065 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 September 2016 M

Palangka Raya, Oktober 2016

Tim Penguji

1. **Dr. Muhammad Ali Sibram M. M.Ag.**
Ketua Sidang
2. **Dr. Tutut Sholihah, M.Pd.**
Penguji Utama
3. **Dr. Sabian Ustman, S.H., M.Si.**
Penguji
4. **Dr. Emawati, M.Ag.**
Sekretaris Sidang

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Direktur
Pascasarjana IAIN Palangka Raya,
Dr. H. Muhammad Nuddin, M.Ag
NIP. 19591009 198903 1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

PENGESAHAN

Judul Tesis : RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH STUDI KASUS
DI SMP ISLAM NURUL IHSAN PALANGKA RAYA

Ditulis Oleh : CHAIRUN NI'MAH

NIM : 14013065

Prodi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana
IAIN Palangka Raya Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Palangka Raya, Oktober 2016

Kaprodi MPI,



Mengetahui,
Rektor,
Dr. H. Hidayatuddin, M.Ag
NIP. 1961009 198903 1002

Dr. H. Sardimi, M.Ag
NIP. 19680108199402 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Resolusi Konflik Kebijakan Kepala Sekolah Studi Kasus di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2016



Yang membuat pernyataan,

Chairun Ni'mah
Chairun Ni'mah
NIM. 14013065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

PERSETUJUAN

Judul Tesis : RESOLUSI KONFLIK KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH STUDI KASUS DI
SMP ISLAM NURUL IHSAN PALANGKA RAYA
Ditulis Oleh : CHAIRUN NI'MAH
NIM : 14013065
Prodi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Palangka Raya,

2016

Pembimbing I,

Dr. Sabian Ustman, S.H., M.Si.
NIP. 19631109 199203 1 004

Pembimbing II,

Dr. Emawati M.Ag
NIP. 19750717 200501 2 006

Mengetahui,
Kaprodi MPI,

Dr. H. Sardimi, M.Ag
NIP. 19680108199402 1 001

ABSTRAK

Konflik memang tidak bisa dihindari dalam sebuah lembaga, tidak terkecuali lembaga pendidikan seperti sekolah. Di SMP Islam Nurul Ihsan, konflik terjadi antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar yang dipicu penetapan kebijakan oleh pihak sekolah. penetapan kebijakan tersebut sebenarnya disepakati bersama antara kedua belah pihak. Namun, terdapat segelintir orang yang masih menolak kebijakan tersebut karena kebijakan oleh pihak sekolah tersebut secara tidak langsung mengubah pola kebiasaan masyarakat sekitar sekolah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: 1) Jenis kebijakan sekolah yang menimbulkan konflik, 2) Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, 3) Resolusi konflik dalam mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya. Tujuan Penelitian adalah: 1) mengetahui jenis kebijakan sekolah sehingga menimbulkan konflik 2) mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya 3) mengetahui solusi konflik dalam mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan lingkungannya.

Metode yang digunakan, metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini berjumlah 18 orang dengan rincian sebagai berikut: kepala sekolah, perwakilan dinas pendidikan kota Palangkaraya, wakil kepala sekolah, perwakilan guru, petugas keamanan sekolah, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Pengumpulan dengan cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif. Tiga komponen utama analisis data, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian: 1) jenis kebijakan sekolah yang menimbulkan konflik, yakni: a) penutupan akses jalan alternatif yang melalui halaman SMP Islam Nurul Ihsan; b) Pelarangan penggunaan halaman sekolah secara umum untuk parkir dan bermain anak-anak; dan c) Pembuatan batas lahan yang dimiliki sekolah dengan yang dimiliki masyarakat. 2) Tanggapan masyarakat terhadap terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan terbagi menjadi dua kelompok, yakni: a) masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut dengan beberapa alasan: sekolah memiliki hak, sekolah memiliki tanggung jawab, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. b) masyarakat yang tidak mendukung kebijakan tersebut beranggapan bahwa kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah telah mengganggu dan mengubah kebiasaan aktifitas mereka. 3) Resolusi konflik dalam mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan lingkungannya, melalui dua upaya yakni: musyawarah dan membentuk program sekolah.

Kata kunci: Resolusi, konflik, kebijakan, sekolah.

ABSTRACT

Conflict is inevitable in an institution, not least in educational institutions such as schools. It can be triggered from the internal or external school. In Nurul Ihsan Islamic Junior High School, the external conflict occurred between the school and society; it was triggered from the establishment of policies by school. The determination of the policy actually been agreed between both parties. However, there are a few people who still reject the policy because the policies by the school indirectly alter the pattern of people's habits around the school.

The problems: 1) type of school policies that lead to conflict, 2) the negative response of society to the leadership of the school in developing Nurul Ihsan Islamic Junior High School Palangkaraya, 3) Conflict Management solutions of Nurul Ihsan Islamic Junior High School Palangkaraya and the environment.

The objectives of this study are: 1) to know the type of school policies that conflict 2) to know the public response to the leadership of the school in developing Nurul Ihsan Islamic Junior High School Palangkaraya 3) to know the conflict management solution of Nurul Ihsan Islamic Junior High School Palangkaraya and the surrounding community.

This study used qualitative method; the type of this study was field research. The subjects of this study are 17 people with the following details: principals, representatives of education department of Palangkaraya, vice-principals, teacher representatives, school security officers, community leaders, and society representatives. The data collections were observations, interviews, and documentations. The data analyses used interactive model. The three main components of the data analysis were data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study are: 1) the type of school policies that lead to conflict, namely: a) the closing of the alternative road access through the courtyard Nurul Ihsan Islamic Junior High School; b) The prohibition of the use of general school yard for parking and children's play; and c) limits the manufacture of land owned by the society-owned schools; 2) The response from the society towards the policy of school leadership in developing Nurul Ihsan Islamic Junior High School divided into two groups, namely: People who support the policy for several reasons: the school has the right; the schools have a responsibility, and avoid things that are not desirable. While people who do not support these policies assume that the measures taken by the school have disrupted their activities and changing the habits. 3) The solution of conflict in managing Nurul Ihsan Islamic Junior High School Palangkaraya and the environment, through two attempts namely: discussion and form a school program.

Keywords: management, conflict, the school environment.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan hamdallah kepada Allah SWT. Tuhan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar konsen dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH. MH., selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ijin, sarana dan fasilitas dalam penyelesaian studi ini.
3. Bapak Dr. Hj. Sardimi, M.Ag selaku ketua Program Studi yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan semangat sehingga perkuliahan pada program ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Emawati, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan penulisan tesis ini hingga selesai.
6. Bapak Drs. Masripani, selaku kepala SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, dewan guru serta tokoh dan warga masyarakat yang telah banyak memberikan informasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian bisa diselesaikan.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Palangka Raya, September 2016
Penulis,

Chairun Ni'mah

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Resolusi Konflik Kebijakan Kepala Sekolah Studi Kasus di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

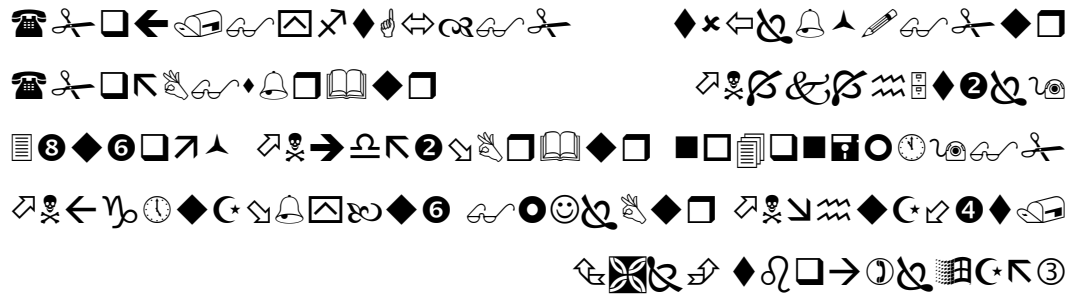
Palangka Raya, September 2016

Yang membuat pernyataan,

Chairun Ni'mah

NIM. 14013065

MOTTO



Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syuura: 38)

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu, kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta yang selalu mendoakan dan tak pernah bosan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Suamiku tercinta Achmad Taufik yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dan selalu setia menemani dan membantuku, baik suka maupun duka dalam meraih kesuksesanku.
3. Anakku tercinta dan tersayang yaitu Naima Fitriani yang selalu menghiburku, menjadi penyemangat dalam hidupku, pengusir rasa lelahku untuk mencapai cita-cita yang mulia ini.
4. Almamaterku

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Persetujuan	iii
Pengesahan	iv
Pengesahan Tesis	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Pernyataan Orisinalitas	x
Motto	xi
Persembahan	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Singkatan	xvii
Daftar Skema	xviii
Pedoman Transliterasi	xvix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Deskripsi Konseptual	9
1. Teori dan Ciri-Ciri Konflik	9

2. Manajemen Konflik	16
3. Resolusi Konflik	18
4. Teori Kebijakan	24
B. Hasil Penelitian yang Relevan	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tempat dan Waktu Penelitian	32
B. Sumber Data Penelitian.....	33
C. Teknik dan Prosedur Penelitian	35
1. Teknik Pengumpulan Data	35
2. Prosedur Pengumpulan Data	41
3. Prosedur Analisis Data	42
D. Pemeriksaan Keabsahan Data	44
E. Kerangka Konsep Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Singkat SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya	47
2. Gambaran Umum tentang Lingkungan Masyarakat SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya	48
a. Gambaran Singkat Lingkungan Sekitar Sekolah	48
b. Akses Jalan Masyarakat Lingkungan Sekitar Sekola ..	48
c. Akses Jalan Peserta Didik dan Dewan Guru	49
d. Bahasa Komunikasi Warga Masyarakat dengan Warga Sekolah	49
e. Interaksi warga Sekolah dengan Masyarakat	50
f. Mata pencaharian masyarakat sekitar sekolah	50
B. Penyajian Data	51
1. Jenis Kebijakan Sekolah yang Menimbulkan Konflik	51
a. Penutupan Akses Jalan Alternatif	51
b. Pelarangan Penggunaan Sarana Milik Sekolah oleh Masyarakat Sekitar	59
c. Pembatasan Lahan Milik Sekolah	64
2. Tanggapan Masyarakat terhadap Kebijakan Pimpinan Sekolah dalam Mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya	69
a. Penutupan Akses Jalan Alternatif	69
b. Pelarangan Penggunaan Sarana Milik Sekolah oleh Masyarakat Sekitar	74
c. Pembatasan Lahan Milik Sekolah	79
3. Resolusi Konflik dalam Mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan Lingkungannya	82

C. Pembahasan Penelitian	88
1) Jenis Kebijakan Sekolah yang Menimbulkan Konflik	91
a. Penutupan Akses Jalan Alternatif	92
b. Pelarangan Penggunaan Sarana Milik Sekolah oleh Masyarakat Sekitar	96
c. Pembatasan Lahan Milik Sekolah	100
2) Tanggapan Masyarakat terhadap Kebijakan Pimpinan Sekolah dalam Mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya	105
a. Tanggapan Masyarakat yang Mendukung terhadap Kebijakan Sekolah	106
b. Tanggapan Masyarakat yang Tidak Mendukung terhadap Kebijakan Sekolah	111
3) Resolusi Konflik dalam Mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan Lingkungannya	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Rekomendasi	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi

Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Kondisi Sekolah

Lampiran 7 Dokumentasi Kondisi Lingkungan Sekolah

Lampiran 8 Undangan Rapat

Lampiran 9 Notulen rapat

Lampiran 10 Daftar Hadir Rapat

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan

Peneliti 29

DAFTAR SINGKATAN

PR (<i>Public Relation</i>)	1
SMP (Sekolah Menengah Pertama)	21
SMA (Sekolah Menengah Atas)	25
Waka (Wakil Kepala)	26

DAFTAR SKEMA

Skema 1: Kerangka Konsep Pendidikan	46
---	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	Be
3	ت	ta'	T	Te
4	ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	J	Je
6	ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8	د	dal	D	De
9	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	R	Er
11	ز	zai	Z	Zet
12	س	sin	S	Es

13	ش	syin	Sy	es dan ye
14	ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	G	Ge
20	ف	fa	F	Ef
21	ق	qaf	F	Ki
22	ك	kaf	K	Ka
23	ل	lam	L	El
24	م	mim	M	Em
25	ن	nun	N	En
26	و	wawu	W	We
27	ه	ha	H	Ha
28	ء	hamzah	...'	Apostrop
29	ي	ya	Y	Ye

B. Konsunan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مَتَعِدَّيْنِ	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هَبَّة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

–	Fathah	ditulis	a
	Kasrah	ditulis	I

–	Dammah	ditulis	u
–			

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas 'a</i>
Kasrah + Ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karim</i>
Dammah + Wawu	ditulis	u
mati		
فروض	ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu	ditulis	au
mati		
قول	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اانتتم	ditulis	<i>a'antum</i>
ااعتت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئنن شكرتم	ditulis	<i>la'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawl al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu organisasi, tidak terkecuali lembaga pendidikan tentu tidak dapat lepas dari peran masyarakat di sekitarnya. Keberlangsungan suatu organisasi, erat kaitannya dengan kemampuan organisasi tersebut menjaga citra yang baik di mata publik agar kepercayaan dan dukungan publik terhadap organisasi tersebut dapat diperoleh. Adanya *public relations* (PR) atau biasa disebut juga dengan hubungan masyarakat (humas) dalam suatu lembaga pendidikan dapat menjadi alternatif resolusi untuk menemukan pemecahan masalah yang dihadapi.

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan melibatkan segala faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor internal dalam lembaga pendidikan yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, proses kegiatan belajar mengajar, pembiayaan, kelulusan. Faktor eksternal dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut yaitu terlibatnya lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah terhadap lembaga pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa orang tua dari peserta didik dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi turut memikirkan dan memberikan bantuan baik material maupun moril dalam

penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tercapai tujuan pendidikan secara maksimal.

Menurut E. Mulyasa, “Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.”¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa antara lembaga pendidikan atau sekolah, memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat sekitar.

Rohiat mengungkapkan bahwa esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk Meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Pada arti yang sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat sudah didesentralisasikan sejak lama. Oleh karena itu, hampir sama halnya dengan pelayanan peserta didik, yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah dan masyarakat.²

Rohiat menjelaskan bahwa antara sekolah dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik untuk menjaga kelestarian dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Diselenggarakannya sekolah di suatu daerah selain sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan anak bangsa, juga untuk menjaga kelestarian nilai-nilai positif masyarakat, dengan harapan sekolah dapat mewariskan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dengan baik dan benar. Sekolah juga berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*), yakni sekolah dapat

¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005., h. 50.

²Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 67.

mengadakan perubahan nilai-nilai dan tradisi sesuai dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat dalam kemajuan dan pembangunan.

Peran sekolah sebagai *agent of change*, dapat terlihat dari hal kecil yang dilakukan peserta didik misalnya pada perubahan tingkah laku peserta didik jika diamati sebelum dan sesudah ia menempuh pendidikan di sekolah. Seorang anak yang menempuh pendidikan dengan menerapkan pola kedisiplinan, maka mereka diharapkan akan terbiasa menerapkan pola kedisiplinan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti 1) ketepatan dalam menghargai waktu, 2) perasaan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, 3) cara bersosialisasi yang lebih baik terhadap orang yang lebih tua dan teman sebaya, dan 4) perilaku hidup bersih yang semakin terlatih dari kegiatan pemeliharaan kelas dan pemberian jadwal piket kelas.³ Perubahan-perubahan tersebut tanpa disadari akan dibawa oleh peserta didik ke lingkungan tempat tinggal, terutama di rumah. Peserta didik yang dengan tertib mengikuti aturan sekolah, diharapkan akan menerapkan kedisiplinan yang serupa saat ia berada di luar sekolah.

Hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan untuk menjembatani kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat itu sendiri. Sekolah melakukan komunikasi dengan masyarakat agar memahami kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting terjalin dengan baik karena saling membutuhkan untuk menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien

³ Wawancara dengan Masripani usia 50 tahun di Palangka Raya, 9 Februari 2016.

serta saling pengertian antara sekolah, dan anggota masyarakat terhadap kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa antara sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik yang saling menentukan keberhasilan proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Hubungan harmonis antara sekolah dan lingkungan masyarakat tempat sekolah berada akan sangat membantu terlaksananya program sekolah apalagi yang berkaitan dengan program kemasyarakatan salah satunya komite sekolah. Sebaliknya, ketidakharmonisan (konflik tertutup) hubungan sekolah dan masyarakat akan menghambat kemajuan sekolah itu sendiri, apalagi jika sampai terjadi konflik kekerasan(Konflik terbuka).

Konflik kekerasan antara sekolah dan masyarakat merupakan permasalahan yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi dalam proses pendidikannya. Walaupun pada kenyataannya tanpa bisa ditolak, konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja bahkan pada siapa saja, baik pada individu maupun organisasi. Hal ini senada dengan pendapat Hendricks⁴ yang menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan karena konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan.

Konflik dapat dipahami terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu di antaranya, karena perbedaan kepentingan, watak, pola pikir, situasi bahkan tujuan yang ingin dicapai oleh personal maupun organisasi. Semakin besar suatu organisasi dan personal di dalamnya, semakin terbuka lebar konflik yang terjadi. Tidak semua konflik yang terjadi berakhir dengan keburukan,

⁴ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 1.

karena sebaliknya ada konflik yang terjadi bahkan menjadi pemicu kemajuan bagi personal maupun organisasi, karena ada kompetisi di dalamnya yang dapat memicu meningkatnya etos kerja.

Dalam buku *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* memuat bahwa:

Teori konflik didasari asumsi bahwa ketegangan yang terdapat di dalam masyarakat diciptakan oleh adanya kompetisi kepentingan individu dan kelompok. Konflik ini terdiri dari dua bentuk, yaitu konflik di arena politik yang sangat fundamental karena diwujudkan oleh adanya keinginan berkuasa dan dominasi dari kelompok dominan terhadap kelompok bawah, dan konflik dalam gagasan dan cita-cita, yang berkaitan dengan dominasi gagasan, cita-cita, dan kepercayaan kepada kelompok bawahan.⁵

Terjadinya konflik di suatu organisasi, salah satunya sekolah, akan dapat menjadi peluang untuk sekolah tersebut dapat maju dan berkembang, apabila konflik tersebut dikelola dengan baik sebagai pemicu prestasi. Mengenali dan menganalisa dengan benar dan tepat jenis serta pemicu terjadinya konflik dalam upaya menemukan jalan pemecahan atau pengelolaan konflik. Konflik-konflik juga dapat memudahkan suatu persoalan organisasi, mengelola konflik tersebut menjadi peluang kemajuan. Sehingga dengan demikian akan mengubah anggapan bahwa ketika suatu organisasi yang di dalamnya terjadi konflik akan menghancurkan organisasi tersebut, karena sebaliknya yang akan terjadi yaitu akan semakin maju dan tangguhnya organisasi tersebut.

Berkaitan dengan tesis ini, penulis menemukan beberapa konflik yang terjadi di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, konflik yang berkaitan dengan hubungan antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Hal itu

⁵Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 1: Ilmu Pendidikan Teoritis*, Bandung: Imperial Bakti Utama, 2009, h. 250.

berkenaan dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah, namun ditentang oleh masyarakat. Sebagai gambarnya, konflik terjadi di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya yang merupakan lembaga pendidikan baru berjalan di tahun ketiga. Sekolah tersebut beralamat di Jl.Dr. Murjani Palangkaraya berada di tengah lingkungan padat. Lingkungan sekolah tersebut, terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Banjar yang menjadi suku mayoritas, Dayak, Jawa dan Madura.⁶ Dekatnya lokasi sekolah dengan pemukiman penduduk, membuat aktivitas dan program sekolah serta kebijakan yang dibuat sekolah dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat tidak semua bisa diterima langsung, terkadang muncul beberapa penolakan dan reaksi yang keras dari beberapa warga masyarakat, sehingga terjadi ketegangan dan hubungan yang kurang harmonis bahkan terjadinya konflik kekerasan antara sekolah dan masyarakat. Kebijakan yang dibuat sekolah yaitu: ditutupnya jalan akses masuk sekolah, pelarangan penggunaan fasilitas sekolah, dan pembatasan lahan sekolah.

Beberapa hal yang memicu terjadinya konflik-konflik di atas sebenarnya tidak perlu terjadi jika pihak sekolah mempunyai hubungan yang harmonis, artinya ada satu kesamaan tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, yang salah satunya dengan ikut mendukungnya masyarakat terhadap program sekolah.

Berdasarkan fakta dan permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang konflik sebagai bahasan tesis dengan

⁶ Wawancara dengan Kepala sekolah di Palangka Raya, 9 Februari 2016.

judul **Resolusi Konflik Kebijakan Kepala Sekolah (Studi Kasus di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan berikut:

1. Apa saja jenis kebijakan sekolah sehingga menimbulkan konflik?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya?
3. Bagaimana Resolusi konflik dalam mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis kebijakan sekolah sehingga menimbulkan konflik.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.
3. Untuk mengetahui resolusi konflik dalam mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan terutama dalam menemukan resolusi dari konflik intern maupun ekstern SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya khususnya.
2. Secara praktis, yaitu:

- 1) Sebagai resolusi terhadap konflik antara sekolah dan masyarakat di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.
- 2) Menawarkan formula manajemen konflik yang efektif pada kasus di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi penulis berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

Pembahasan tentang Resolusi Konflik Kebijakan Kepala Sekolah (Studi Kasus di Lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya) ini memerlukan teori mengenai konflik.

1. Teori dan Ciri-Ciri Konflik

Adapun beberapa teori konflik terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Robbins

Konflik dinamai sebagai suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Suatu ketidakcocokan belum bisa dikatakan konflik jika salah satu pihak tidak memahami adanya ketidakcocokan tersebut.⁷

b. Clinton

Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda. Konflik juga merupakan suatu interaksi yang antagonis mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas mulai dari bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka.⁸

c. White & Bednar

Konflik sosial adalah suatu interaksi antara orang-orang atau kelompok yang saling bergantung merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain dalam mencapai tujuan itu.⁹

⁷ Robbins, Stephen P., Timothy . Judge. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2008, h. 295.

⁸ *Ibid.* h. 295.

⁹ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 295.

Selain beberapa pendapat di atas, ada pendapat lain mengenai konflik sebagai berikut:

“Bahwa timbulnya konflik adalah berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat. Disadari atau tidak, bahwa keberadaan fakta kualitas organisme, dan situasi lingkungan sosial masyarakat manusia dengan berbagai kepentingannya, telah melahirkan berbagai macam perbedaan dan atau pertentangan di antara mereka.¹⁰ Senada dengan hal di atas, Simmel berpendapat bahwa konflik tidak dapat dielakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya bisa dibedakan secara analisis.”¹¹

Afzalur Rahim mendefinisikan konflik sebagai keadaan interaktif yang termanifestasikan dalam sikap ketidakcocokan, pertentangan, atau perbedaan dengan atau antara entitas sosial seperti individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi.¹²

Konflik muncul karena dipicu oleh beberapa sumber. Menurut Wahjosumidjo dalam buku yang sama mengatakan “konflik itu sendiri terjadi selalu bersumber pada manusia dan perilakunya, di samping pada struktur organisasi dan komunikasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi baik dalam satu individu maupun organisasi karena adanya perbedaan pola pikir, watak, kepentingan, situasi pada suatu lingkungan sehingga pada akhirnya akan mengganggu tercapainya suatu tujuan antar individu maupun antar kelompok. Sehingga dapat diketahui bahwa konflik memiliki ciri-ciri: (1)

¹⁰Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 15.

¹¹*Ibid*, h. 16.

¹²Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Erlangga, 2007, h. 235.

Ada interaksi yang bersifat antagonis; (2) Adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu; (3) Adanya bentuk perlawanan terbuka; (4) Perlawanan terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Pendapat Tim Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, konflik bisa terjadi pada semua tingkat, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang.
- b. Konflik interpersonal, yaitu konflik antara dua individu atau lebih.
- c. Konflik intragrup, yaitu konflik antara dua atau beberapa orang dalam satu grup.
- d. Konflik intergrup, yaitu konflik antarkelompok.
- e. Konflik intraorganisasi, yaitu konflik antarunit dalam suatu organisasi.
- f. Konflik interorganisasi.¹³

Senada dengan pendapat di atas, Saefullah dalam buku Manajemen Pendidikan Islam memberikan penjelasan bahwa munculnya konflik dilatarbelakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan budaya, hal ini dijelaskan dalam teori yang disebutkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. *Pertentangan*. Du Brin, mengatakan bahwa konflik mengacu pada pertentangan antarindividu, kelompok atau organisasi yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat yang saling menghalangi dalam pencapaian tujuan.
- b. *Perilaku*. Tjosfold (dalam Champoux), memandang konflik dalam organisasi sebagai perilaku yang berlawanan dan bertentangan.
- c. *Hubungan*. Martinez dan Fu menyatakan konflik adalah hubungan yang terjadi antara dua orang, kelompok, organisasi ataupun golongan.

¹³Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Panduan Manajemen Sekolah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 1998, h. 188.

- d. *Situasi*. Nelson dan Quick melihat konflik sebagai situasi ketika tujuan, sikap, emosi, dan tingkah laku yang bertentangan menimbulkan oposisi dan sengketa antar dua kelompok atau lebih.
- e. *Konflik* merupakan gejala individu atau kelompok yang menunjukkan sikap atau perilaku “bermusuhan” terhadap individu atau kelompok lain, sehingga memengaruhi kinerja salah satu atau semua pihak yang terlibat.¹⁴
- f. *Konflik*, Lewis Coser berpandangan bahwa konflik adalah perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau menenyapkan lawan.¹⁵ Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu.
- g. Dahrendorf yang memberikan gambaran teori konflik sebagai berikut:
 - 1) Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan; perubahan ada di mana-mana; (2) disensus¹⁶ dan konflik terdapat dimana-mana; (3) setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat; dan (4) setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain.
- h. Teori Konsensus menekankan integrasi dan saling melengkapi ciri keanekaragaman bagian pada struktur sosial, tetapi konflik memiliki ciri bahwa setiap lembaga sosial dan kelompok biasanya bekerja menurut tujuan yang berlawanan satu sama lainnya. Tujuan dan program pada satu kelompok sering mendapat tujuan tambahan dari

¹⁴ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 294-295.

¹⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi edisi Revisi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, h. 219.

¹⁶ Disensus adalah situasi sosial yang memperlihatkan terjadinya ketidaksepakatan mengenai penerapan nilai-nilai tertentu.

tujuan dan program lain. Kepentingan kelompok yang memegang kekuatan memperuncing pertentangan dengan minat kelompok bawah. konflik kemudian mempengaruhi usaha kelompok kuat untuk menguasai, walaupun kadangkala konflik ini relatif secara diam-diam, tetapi sering pula muncul secara terbuka dan kasar.¹⁷

Berdasarkan beberapa gambaran teori konflik yang dikemukakan tokoh di atas memberikan pemahaman bahwa konflik merupakan situasi di mana adanya ketidaksamaan cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh dua kelompok atau lebih, sehingga menimbulkan ketegangan, sengketa, bahkan tidak jarang memunculkan korban jiwa dan juga kerugian secara psikologi dan juga materi bagi pihak-pihak yang berkonflik.

Sementara tokoh lain berpendapat tentang teori konflik, maka Wijono dalam *konflik dan stres*, memaparkan bahwa ciri-ciri konflik adalah:

- a. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
- b. Paling tidak, timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
- c. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, sandang, pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologi seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri.

¹⁷Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: IMTIMA, h. 245.

- d. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.
- e. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan sebagainya.¹⁸

Selain pendapat di atas secara singkat dapat dipahami bahwa ciri-ciri lain suatu konflik yaitu:

- a. Paling tidak ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok terlihat dalam suatu interaksi yang berlawanan.
- b. Saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan.
- c. Adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan.
- d. Akibat ketidakseimbangan.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa terjadinya suatu konflik dalam sebuah organisasi dikarenakan adanya pertentangan dari dua orang atau lebih, dikarenakan perbedaan pandangan dan juga tujuan yang ingin dicapai, namun ketika terdapat perbedaan namun itu tidak dijadikan permasalahan maka hal tersebut tidak disebut sebagai suatu konflik.

Konflik dalam keberadaannya tidak serta merta muncul menjadi besar namun terdapat tiga tahapan dalam terjadinya konflik, yaitu:

Tahap Satu -----	Peristiwa sehari-hari
Tahap Dua -----	Tantangan
Tahap Tiga -----	Pertentangan ²⁰

¹⁸ http://jurnal.sdm.blogspot.com/2014/04/manajemenkonflik_definisi-ciri-sumber.html
diunduh pada 16 September 2015. Pukul 1.02 WIB.

¹⁹ [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr.Sumaryanto.mkes/6- Manajemen konflik sebagai salah satu solusi dalam pemecahan masalah-2](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr.Sumaryanto.mkes/6-Manajemen_konflik_sebagai_salah_satu_solusi_dalam_pemecahan_masalah-2), diunduh pada 2 Januari 2015.

Adanya tahapan dalam keberadaan konflik seperti yang disebutkan di atas maka dalam pengelolaannya harus lebih dulu mengetahui karakteristik konflik dalam setiap tahapannya.

2. Manajemen Konflik

Definisi manajemen konflik banyak dikemukakan oleh para ahli, namun terlebih dulu dikemukakan oleh peneliti mengenai definisi manajemen oleh beberapa ahli, yaitu: Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasi atau maksud yang nyata.²¹ Sedangkan menurut Parker (Stoner & Freeman), manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*).²² Kemudian Sudjana, mengatakan bahwa manajemen adalah kepemimpinan dan keterampilan untuk melakukan kegiatan baik bersama-sama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.²³

Manajemen dapat dikatakan sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Pada sebuah lembaga atau organisasi, aktivitas manajemen berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengembangkan dan

²⁰ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 7

²¹George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa G. A Ticoalu, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 107.

²²Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 5.

²³Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, Bandung: Falah Production, 2004, h. 17.

memimpin suatu tim kerja sama atau kelompok dalam satu kesatuan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan Manajemen konflik para ahli memberikan definisi diantaranya yaitu: William Hendricks, “konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Umat manusia selalu berjuang dengan konflik. Perang yang telah terjadi pada abad-abad yang lampau menyisakan pengaruh, dan dalam dunia bisnis sulit dibayangkan suatu hari tanpa konflik. Sekarang kita dituntut untuk memerhatikan konflik. Kita memerlukan jalan untuk meredam ketakutan terhadap konflik. bisnis, keluarga dan kontak sosial kita dapat diperluas bila konflik itu dapat dipahami.”²⁴

Greenhald memahami bahwa konflik bukan fenomena yang objektif dan nyata, melainkan ada dalam benak orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, untuk menangani konflik, seseorang perlu bersikap empati, yaitu memahami keadaan sebagaimana yang dilihat oleh para pelaku penting yang terlibat konflik.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen konflik di atas dapat dipahami bahwa manajemen konflik merupakan langkah atau cara bagaimana mengelola sebuah permasalahan yang menjadi konflik agar hal tersebut tidak menjadi penghambat tujuan dalam sebuah

2. ²⁴ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 1-

304. ²⁵ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 303-

lembaga dengan mengutamakan penanganan yang melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya dengan cara yang baik, sehingga konflik yang terjadi pada akhirnya menemukan jalan keluar dan bahkan dapat menjadi kekuatan baru bagi lembaga yang terkait.

3. Resolusi Konflik

Setelah berbicara mengenai manajemen konflik, maka untuk lebih lanjut penulis memberikan uraian berkaitan dengan resolusi yang dilakukan sebagai jalan pemecahan konflik yang diuraikan oleh beberapa ahli, sebagai berikut: Kusnadi berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu antara lain adalah; adanya perbedaan dalam berbagai aspek, adanya bentrokan kepentingan, dan adanya perubahan sosial yang tidak merata. Kemudian ada bentuk penyelesaian atau pengelolaan konflik yang ditawarkan, antara lain; kompromi; toleransi; konversi; *arbitrage*, dan *mediation*; *stalemate*; kemudian *coersion*.²⁶

Dharmawan menegaskan bahwa secara umum resolusi konflik seharusnya dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan.²⁷ Keberadaan suatu konflik dalam suatu organisasi termasuk sekolah tidak selamanya berdampak negatif. Konflik juga memiliki sisi positif. Konflik dikatakan mempunyai nilai positif, misalnya apabila konflik terjadi

²⁶ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 17.

²⁷ <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-konflik-dan-resolusi-konflik.html> diakses pada hari Senin, 3 Oktober 2016 Pukul 13.45 WIB.

karena adanya sistem pelayanan yang kurang memuaskan dari pimpinan lembaga kepada para pegawainya, solusinya adalah pimpinan lembaga menyadari keteledorannya dan meningkatkan pelayanannya.

Fisher menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

²⁸ Usaha-usaha perlu dilakukan agar konflik berada pada situasi optimal, sehingga konflik tersebut dapat mencegah kemacetan, merangsang kreatifitas, menghilangkan ketegangan, dan memprakarsai benih-benih untuk perubahan. Robbins menjelaskan bahwa konflik itu baik bagi organisasi jika:

- 1) Konflik merupakan alat untuk menimbulkan perubahan;
- 2) Konflik mempermudah terjadinya keterpaduan (*cohesiveness*) kelompok;
- 3) Konflik dapat memperbaiki efektivitas kelompok dan organisasi;
- 4) Konflik menimbulkan tingkat ketegangan yang sedikit lebih tinggi dan lebih konstruktif.²⁹

Senada dengan hal di atas, G.W. Allport sebagaimana dikutip Mujamil, menyatakan bahwa semakin banyak sarjana sosial yang memaparkan bahwa konflik itu sendiri bukan kejahatan, tetapi lebih merupakan suatu gejala yang memiliki pengaruh-pengaruh konstruktif atau destruktif, tergantung pada manajemenya. Yang oleh D. Sudjana dijabarkan sebagai berikut:

²⁸ Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, (Jakarta: The British Council, Indonesia, 2001), h. 7.

²⁹ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 302.

Di satu pihak, konflik dapat membahayakan keharmonisan kelompok apabila konflik laten di antara anggota pada suatu saat muncul menjadi perbuatan yang merusak (destruktif), sehingga konflik itu dapat menghambat upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan kelompok/organisasi dan perorangan. Di pihak lain, konflik dapat menguntungkan kegiatan kelompok apabila hal itu merangsang timbulnya gagasan-gagasaan baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan kelompok, mengarahkan kreativitas kelompok dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan menjaga agar kelompok selalu memedulikan berbagai kepentingan anggotanya. Konflik yang disebut terakhir ini dapat dimanfaatkan agar kelompok lebih tanggap terhadap kebutuhan anggota.³⁰

Berkenaan dengan dua pandangan berbeda yang menilai keberadaan konflik sebagai nilai negatif dan nilai positif, maka ketika suatu konflik dinilai negatif maka harus ada solusi dalam pemecahan konflik tersebut, sebaliknya ketika dikatakan mempunyai nilai positif maka ada satu perubahan ke arah yang baik dan membangun ketika suatu konflik itu terjadi. Konflik yang terjadi dianggap sebagai satu hal yang positif apabila dianggap sebagai suatu koreksi sosial terhadap kurangnya pelayanan atau kinerja dari sebuah organisasi. Salah satu tahapan yang dapat ditempuh dalam pengelolaan konflik yaitu: 1) Perencanaan analisis konflik; 2) Evaluasi konflik; 3) Pemecahan konflik.

Selain itu langkah-langkah dalam mengelola konflik, yaitu: 1) Usahakan memperoleh semua fakta mengenai keluhan itu; 2) Usahakan

³⁰Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Erlangga, 2007, h. 235-236.

memperoleh dari kedua pihak; 3) Selesaikan problema itu secepat mungkin.³¹

Unsur terpenting dalam manajemen konflik adalah pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Masalah-masalah yang dipertanyakan
- 2) Ukuran taruhan. Semakin besar nilai yang dipertaruhkan dalam perdebatan, semakin sulit konflik dipecahkan.
- 3) Saling kebergantungan pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Kontinuitas interaksi.
- 5) Struktur pihak-pihak yang terlibat.
- 6) Keterlibatan pihak ketiga.
- 7) Kemajuan konflik.³²

SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, telah melakukan upaya-upaya dengan pendekatan persuasif melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Pihak sekolah mencari akar permasalahan/konflik yang terjadi.
- 2) Pihak sekolah berupaya bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.
- 3) Pihak sekolah dan pihak masyarakat yang terlibat konflik melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar.³³

Memahami bahwa konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena melekat erat dalam jalinan kehidupan manusia, maka ketika dihadapkan pada sebuah konflik terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengelola konflik, yaitu:

- a. *Competition*, yaitu semua pihak yang berkonflik dipersilahkan berlomba untuk mencapai tujuan yang ingin di capai dengan cara yang transparan
- b. *Avoidance*, yaitu salah satu pihak yang berselisih menarik/memisahkan diri atau berusaha menekan konflik yang terjadi.

³¹*Ibid* h. 244-245.

³²Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 304-305.

³³ Lihat wawancara dengan Masripani di Palangka Raya, 9 Februari 2016. .

- c. *Accommodation*, yaitu salah satu pihak yang berselisih berusaha mengalah.
- d. *Compromise*, yaitu kedua belah pihak yang berselisih bersama-sama bersedia untuk berkorban melalui kompromi, jadi lebih mengedepankan kepentingan bersama/umum.
- e. *Collaboration*, yaitu pendekatan metode ini yang memberikan keuntungan bagi semua pihak dengan jalan mengatasi masalah melalui pemecahan masalah bersama.³⁴

Senada dengan hal di atas, Saefullah, mengutip lima gaya yang diperkenalkan oleh Kreitner dan Kinicki, yaitu sebagai berikut:

- a. *Integrating (problem solving)*. Pada gaya ini pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah.
- b. *Obliging (smoothing)*, yaitu upaya untuk memuaskan pihak lain dari pada diri sendiri karena berupaya mengurangi perbedaan-perbedaan dan menekankan persamaan atau kebersamaan di antara pihak-pihak yang terlibat.
- c. *Dominating (forcing)*, yaitu gaya memaksa. Dikarenakan orientasi pada diri sendiri yang tinggi, dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Gaya ini disebut memaksa karena menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah.
- d. *Avoiding (taktik menghindar)*, gaya ini cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sepele atau remeh, atau jika biaya yang harus dikeluarkan untuk konfrontasi jauh lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh. Gaya ini tidak cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit atau buruk.
- e. *Compromising*. Gaya ini menempatkan seseorang pada posisi moderat, yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Hal ini merupakan pendekatan saling memberi dan menerima dari pihak-pihak yang terlibat. Kompromi cocok digunakan untuk menangani masalah yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan berbeda, tetapi memiliki kekuatan yang sama.³⁵

³⁴ William Hendricks, *Bagaimana ...*, h. 48-55.

³⁵ Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 305-

Berdasarkan lima gaya yang disebutkan oleh Saefullah, penulis mengamati bahwa pimpinan SMP Islam Nurul Ihsan Palangka Raya menggunakan gaya yang pertama, yakni *integrating (problem solving)*. Hal itu didukung dengan bukti-bukti berikut:

1. Pihak sekolah berupaya mengidentifikasi penyebab konflik yang terjadi.
2. Pihak sekolah mengundang dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait untuk bersama mencari penyelesaian.
3. Pihak sekolah dan masyarakat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah.³⁶

4. Teori Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam penelitian ini merupakan upaya-upaya untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan dan keamanan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah tersebut. Kebijakan yang ditetapkan berupa tindakan nyata yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait.

Berikut beberapa pengertian kebijakan menurut ahli.

- a. Menurut Lasswell (1970): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (*a projected program of goals values and practices*).
- b. Menurut Anderson (1979): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*).
- c. Menurut Heclo (1977): kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
- d. Menurut Eulau (1977): kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan.
- e. Menurut Amara Raksasa Taya (1976): kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

³⁶ Lihat wawancara dengan Kepala Sekolah di Palangka Raya, 9 Februari 2016.

- f. Menurut Friedrik (1963): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.
- g. Menurut Budiardjo (1988): kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- h. Menurut Carter V. Good (1959): kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.
- i. Menurut Indra Fachrudi (1984): kebijakan adalah suatu ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan.³⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan secara terarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Pelaksanaan kebijakan telah melalui tahapan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis dari beberapa sumber, banyak penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan konflik, terutama konflik sosial di masyarakat, namun penelitian yang dilakukan tersebut lebih banyak meneliti tentang konflik sosial yang dilakukan pada masyarakat secara umum atau bahkan konflik internal organisasi itu sendiri. Namun ada beberapa penelitian yang mempunyai

³⁷ <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> diakses pada hari senin, 3 Oktober 2016, pukul 08.45 WIB.

hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berkenaan dengan strategi resolusi konflik yang terjadi antara organisasi sekolah dengan lingkungan di sekitar sekolah itu berada, antara lain:

1. Sebuah Tesis Penelitian berjudul “Pola Penyelesaian Masalah Internal Di Sekolah (Studi Kasus Pada SMA Negeri Dan SMA Swasta di Kabupaten Wonosobo) oleh Akhmad Aziz Safarudin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian masalah internal sekolah pada SMA Negeri dan SMA Swasta yang masing-masing berjumlah 7 sekolah yang ada di Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya untuk mengkaji kasus-kasus secara mendalam dan tuntas. Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimpulkan dalam perilaku masyarakat yang lebih spesifik merujuk pada kelompok organisasi pendidikan (sekolah).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada perbedaan yang terjadi dalam penanganan masalah yang dilakukan di sekolah Negeri maupun Swasta. Sehingga ditemukan bahwa penanganan permasalahan yang terjadi dikalangan siswa dapat dilakukan dengan penanganan berjenjang yang dimulai dari wali kelas, guru BK, Waka kesiswaan dan jenjang tertinggi pada tingkat kepala sekolah.

Permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan peserta didik dilakukan dengan pemberian sanksi yang bersifat fisik, seperti melakukan kebersihan sekolah, membuat surat pernyataan dan sanksi tegas lainnya. Sedangkan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan guru dan

karyawan diintervensi langsung oleh kepala sekolah, dengan beberapa pola penyelesaian yang dilakukan.³⁸

2. Sebuah Tesis Penelitian berjudul “Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik di Sekolah Dasar“. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunikasi dalam penyelesaian konflik di SD yang memiliki latar belakang yang berbeda penyelenggaraannya di Kabupaten Banyuwangi, yaitu SDN 4 Penganjuran, SDK Santa Maria dan SDU Habibulloh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multikasus, informan ditetapkan secara purposif dengan terlebih dulu menentukan informan kunci, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul tersebut diorganisir, ditafsir dan dianalisis secara berulang-ulang melalui analisis dalam kasus dan lintas kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dapat menyelesaikan konflik di Sekolah Dasar, yaitu melalui: 1) proses komunikasi yang berlangsung secara efektif, santun dan menarik, 2) iklim komunikasi yang berlangsung secara kondusif, dan 3) langkah-langkah penyelesaian konflik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelesaian konflik yang efektif.³⁹

3. Sebuah Tesis dengan Judul “Pengelolaan Konflik Kinerja Guru (Studi Kasus SMP Negeri 7 Klaten)”. Penelitian ini bertujuan untuk

³⁸ Akhmad Aziz, *Pola Penyelesaian Masalah Internal Di Sekolah* (Studi Kasus Pada SMA Negeri Dan SMA Swasta di Kabupaten Wonosobo), Wonosobo: Tahun 2010.

³⁹ Isparwanto, *Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik di Sekolah Dasar* (Studi Kasus pada 4 SDN di Kabupaten Banyuwangi), Banyuwangi: Tahun 2012.

mendeskripsikan sumber dan jenis tesis, penanganan konflik dan pengendalian konflik yang terjadi di SMP Negeri 7 Klaten.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sumber konflik, yaitu pribadi atau individual tentang perbedaan-perbedaan dalam tujuan, saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja, perbedaan nilai-nilai atau persepsi tentang beban kerja, dan organisasi tentang pencapaian program sekolah; 2) penanganan konflik dilaksanakan melalui pembinaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan konflik, yaitu dengan memanggil pihak yang berkonflik untuk duduk bersama mencari jalan keluar, adanya komunikasi untuk menyelesaikan masalah dan peran aktif bersama, misalnya dengan cara persuasi, tawar-menawar, dan koreksi diri; dan 3) pengendalian konflik melalui kompetisi, penghindaran, akomodasi, kompromi, dan kolaborasi.⁴⁰

Apabila dibanding dengan hasil penelitian sebelumnya, dapat dijelaskan sebagai berikut: Penelitian yang akan dilakukan penulis terfokus pada permasalahan konflik yang terjadi di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya yang di beberapa kasus melibatkan pihak masyarakat di sekitar dengan pihak sekolah. Teori yang digunakan mengenai konflik, sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif,

⁴⁰ Wariso. *Pengelolaan Konflik Kinerja Guru (Studi Kasus SMP Negeri 7 Klaten)*, Surakarta: Tahun 2013.

metode analisis yang penulis rencanakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan data.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, oleh penulis diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel Uraian 1
Daftar Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penulis

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Tesis oleh: Akhmad Aziz Safarudin.</p> <p>Judul: Pola Penyelesaian Masalah Internal di Sekolah (Studi Kasus pada SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Wonosobo)</p> <p>Tahun 2010</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian oleh Akhmad Aziz Safarudin sama-sama mengangkat tentang konflik yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan.</p> <p>2. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dan Akhmad Aziz Safarudin sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pemaparan data melalui kalimat-kalimat.</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Aziz Safarudin ini berfokus pada masalah intern yang terjadi di sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang konflik antara sekolah dengan masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pihak sekolah.</p> <p>2. Jenjang sekolah yang dipilih juga menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Akhmad Aziz Safarudin. Peneliti memilih jenjang SMP, sedangkan Akhmad Aziz Safarudin memilih jenjang SMA.</p> <p>3. Objek penelitian Akhmad Aziz Safarudin adalah tujuh sekolah, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis hanya satu sekolah saja.</p>
2.	<p>Tesis oleh: Isparwanto.</p> <p>Judul: Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik di Sekolah Dasar.</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian oleh Isparwanto sama-sama mengangkat tentang konflik dan penyelesaian atau kebijakan yang harus ditempuh oleh sebuah</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan oleh Isparwanto ini hanya berfokus peran komunikasi sebagai cara penangana konflik yang terjadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis</p>

	Tahun 2012	<p>lembaga pendidikan.</p> <p>2. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dan Isparwanto sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pemaparan data melalui kalimat-kalimat.</p>	<p>membahas mengenai beberapa kebijakan yang menimbulkan konflik kemudian mencari resolusi penyelesaian terhadap konflik. Penelitian oleh Isparwanto ini juga hanya fokus pada konflik internal di sebuah lembaga pendidikan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada konflik yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat.</p> <p>2. juga menjadi perbedaan antara Jenjang sekolah yang dipilih. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Isparwanto. Penulis memilih jenjang SMP, sedangkan Isparwanto memilih jenjang SD.</p> <p>3. Objek penelitian Isparwanto adalah tiga sekolah, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis hanya satu sekolah saja.</p>
3.	<p>Tesis oleh: Wariso</p> <p>Judul: Pengelolaan Konflik Kinerja Guru (Studi Kasus SMP Negeri 7 Klaten).</p> <p>Tahun 2013</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian oleh Wariso sama-sama mengangkat tentang konflik dan penyelesaian atau kebijakan yang harus ditempuh oleh sebuah lembaga pendidikan.</p> <p>2. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dan Wariso sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pemaparan data melalui kalimat-kalimat.</p> <p>3. Jenjang sekolah yang dipilih juga menjadi persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Wariso. Peneliti dan Wariso sama-sama memilih jenjang SMP sebagai objek penelitian.</p> <p>4. Jumlah objek penelitian antara penelitian yang</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Wariso hanya berfokus pada konflik atau permasalahan yang berhubungan dengan kinerja guru. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas konflik yang muncul antara sekolah dan masyarakat.</p>

		dilakukan oleh penulis dan oleh Wariso sama-sama berjumlah satu sekolah.	
--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, Jl. Dr. Murjani, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kode Pos 73111, Nomor telepon sekolah (0536) 3232066.

Tempat penelitian ini dipilih karena sesuai dengan penelitian awal oleh penulis bahwa telah terjadi beberapa peristiwa yang menurut penulis dapat dikatakan sebagai suatu konflik, karena dari peristiwa yang terjadi ada pertentangan kepentingan antara beberapa pihak, terjadinya pengrusakan. Apa yang terjadi ini sesuai dengan ciri-ciri dikatakannya sebuah peristiwa menjadi sebuah konflik. Ketika konflik tersebut muncul, pihak sekolah berupaya mencari resolusi yang tepat terhadap konflik yang dihadapi. Tindakan tersebut merupakan upaya untuk melakukan manajemen terhadap konflik yang terjadi. Sehingga penulis memilih SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya sebagai tempat penelitian.

Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai bulan juli 2016. Penelitian lapangan secara intensif selama 2 bulan, sebelumnya sudah dilakukan pengamatan secara mandiri dan bertahap. Diharapkan dari pengajuan judul, bimbingan proposal, ujian proposal tesis, penelitian di lapangan, bimbingan tesis, dan ujian tesis dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ada.

B. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Bodgan dan Tylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif yang berisi ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang observasi”.⁴¹

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah (fenomenologi). Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah adanya peristiwa yang terindikasi pada konflik karena adanya kebijakan yang dibuat kepala sekolah yang ditentang bahkan ditolak oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

Sumber utama data kualitatif adalah data yang diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisa dokumen atau respon survei.⁴² Pada Klasifikasinya, sumber data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *person* (sumber data yang berupa orang), *place* (sumber data yang berupa tempat), dan *paper* (sumber data yang berupa simbol).⁴³

Sedangkan yang dimaksud data adalah segala fakta dan angka yang dapat

⁴¹Bodgan, Robert dan Tylor, Steven J, “*Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*”, Ed. Afandi, A. Khozin, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, h. 30. di kutip Samsul Arifin.

⁴²Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kuaalitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2005, h. 63.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 129

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.⁴⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, Adapun data yang akan dicari bersumber dari Informan sebagai sumber Primer yaitu: Wakasek, guru, peserta didik, pengurus yayasan, tokoh masyarakat dan warga masyarakat sekitar lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya yang semuanya berjumlah 18 orang.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan tertulis atau bahan perpustakaan, yakni buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan koran yang membahas masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini, sejarah SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, Visi, Misi, struktur organisasi RT dan RW Lingkungan sekolah berada. Sumber data sekunder lainnya adalah foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilakukan sendiri ataupun bersama warga yang dapat memberikan gambaran nyata pada aspek-aspek yang diteliti, selain itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kualitatif yang berupa dokumentasi tentang data-data konflik, solusi dan metode pemecahan konflik yang terjadi di lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan data

⁴⁴*Ibid*, h. 118.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁵

Pada penelitian kualitatif, pada dasarnya teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam untuk menjelajahi dan melacak secara memadai terhadap realitas fenomena yang tengah distudi.⁴⁶

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa pihak yaitu:

- a. Pemerintah, dengan informan Dinas pendidikan.

Penulis menentukan yang menjadi narasumber dari pihak Dinas Pendidikan adalah Kepala Bagian Sarana prasarana. Hal ini berdasarkan bahwa konflik yang terjadi di SMP Islam Nurul terkait dengan masyarakat sekitar berhubungan dengan sarana dan prasarana yang oleh masyarakat sekitar dialihfungsikan untuk kegiatan umum. Kepala bagian Sarpras merupakan narasumber yang relevan untuk membicarakan mengenai konflik dan penanganan yang tepat di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

- b. Sekolah, dengan informan kesek, wakasek, dan guru.

- 1) Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah lembaga pendidikan. Seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan sebuah kebijakan yang telah dimusyawarahkan.

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70-71.

Berdasarkan hal ini, peneliti beranggapan bahwa kepala sekolah merupakan salah satu narasumber penting terhadap penelitian yang berhubungan dengan kebijakan yang menimbulkan konflik di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

- 2) Wakil Kepala Sekolah merupakan orang-orang dengan kinerja yang diharapkan dapat turut serta lebih aktif di bidangnya masing-masing. Wakil kepala sekolah dipilih sebagai narasumber karena mereka punya andil besar sebagai pemicu kemajuan di sebuah lembaga pendidikan.
- 3) Penulis memilih perwakilan guru sebagai narasumber dikarenakan tugas seorang guru tidak hanya sekadar mengajar. Guru yang profesional adalah orang-orang yang dengan aktif memberi sumbangsih pikiran untuk kemajuan sekolah tempat bekerja, termasuk turut bersama mencari jalan keluar untuk konflik-konflik yang dihadapi sekolah.

c. Masyarakat, dengan informan tokoh dan warga masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis melibatkan perwakilan masyarakat sebagai narasumber. Hal itu dikarenakan konflik yang terjadi di SMP Islam Nurul Ihsan berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar.

- 1) Narasumber pertama yang dipilih penulis adalah beberapa tokoh masyarakat, seperti ketua RT dan RW. Tokoh masyarakat ini dipilih sebagai narasumber karena orang-orang tersebut merupakan pemimpin di daerah sekitar yang secara otomatis mengetahui hal-

hal yang terjadi di wilayahnya, termasuk konflik yang terjadi antara pihak SMP Islam Nurul Ihsan dengan masyarakat sekitar.

- 2) Perwakilan masyarakat berikutnya yang dipilih sebagai narasumber adalah masyarakat sekitar yang anaknya bersekolah di SMP Islam Nurul Ihsan. Para orang tua wali secara tidak sengaja mengetahui konflik yang terjadi di sekolah dari anak-anak mereka.
- 3) Narasumber terakhir dari pihak masyarakat adalah masyarakat yang tempat tinggalnya bersebelahan atau berada dekat dengan SMP Islam Nurul Ihsan Palangka Raya. Masyarakat sekitar tentu mengetahui dengan persis konflik-konflik yang muncul karena kebijakan yang diambil pihak sekolah.

Satu narasumber merupakan pihak yang melakukan pertentangan secara langsung terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

a) Observasi atau pengamatan.

Observasi adalah metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang diteliti dalam observasi peneliti mengamati secara langsung di lapangan.⁴⁷

Kegiatan observasi dilakukan penulis dengan terjun langsung ke lapangan yaitu lokasi penelitian SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, untuk menentukan subyek dan obyek dalam penelitian, menentukan

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 234.

para informan dalam penelitian, mengidentifikasi apa saja kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala sekolah, mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan yang terindikasi konflik, sehingga dari observasi awal penulis mempunyai gambaran apa yang akan direncanakan dan kemudian dilakukan untuk proses penelitian selanjutnya.

Penulis melakukan observasi terhadap hal-hal berikut:

1. Keadaan awal di lapangan.
2. Kesenjangan yang muncul di lapangan.
3. Kebijakan yang memicu konflik di lapangan.

Setelah penulis melakukan observasi, ditemukan fakta-fakta konflik berikut.

1. Pihak sekolah merasa perlu menetapkan beberapa kebijakan berkaitan dengan permasalahan yang muncul.
2. Setelah kebijakan ditetapkan, masyarakat sebagai pihak terkait ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

b) Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam perlu dilakukan untuk mengatasi terjadinya bias informasi yang diragukan kesahihannya, maka pada setiap wawancara dilakukan pengujian informasi dari informan sebelumnya dan diadakan pencarian sumber informasi baru.

Menurut Michael Quinn Patton sebagaimana dikutip oleh Rulam Ahmadi cara yang utama dilakukan oleh ahli peneliti kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif. Yang dimaksud dengan wawancara mendalam, mendetail atau intensif adalah upaya menemukan pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wawancara

untuk mencari data digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi.⁴⁸ Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subyek atau responden.⁴⁹ Hal paling penting dari wawancara mendalam adalah peneliti berbaur dan mengambil bagian aktif dalam situasi sosial penelitian, sehingga peneliti dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya.⁵⁰

Teknik wawancara mendalam ini dilakukan penulis pada saat mewawancarai kepala sekolah, Wakasek, tokoh masyarakat dan warga masyarakat, wawancara direkam dan dipelajari secara mendalam, lalu peneliti berdiskusi dengan para guru atau informan lain yang memiliki hubungan erat dengan data-data penelitian yang ingin dikumpulkan. Selain itu juga dibuatkan panduan wawancara sesuai kebutuhan penelitian.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.⁵¹

Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang berhubungan dengan karakteristik SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan Karakteristik Lingkungan Masyarakat SMP Islam

⁴⁸Rulan Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri MalangPress, 2005, h. 71.

⁴⁹Yatim Riyatno, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* Surabaya: Penerbit SIC, 2001, h. 67.

⁵⁰Ibid , h. 26.

⁵¹Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 108.

Nurul Ihsan Palangkaraya dan data yang bersifat dokumentasi lainnya.

Data ini antara lain berupa:

- a) Profil SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya
- b) Letak Geografis SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.
- c) Sarana prasarana yang ada di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.
- d) Catatan-catatan, dokumen, surat-surat, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan focus penelitian.

Menurut Sartono Kartodirejo, agar data yang diperoleh melalui dokumentasi ini terjamin akurasi, maka perlu dilakukan tiga telaah yaitu: (1) keaslian dokumen; (2) kebenaran isi dokumen; (3) relevansi isi dokumen dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵²

2. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data atau Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Moleong seperti dikutip oleh Ahmad Tanzeh terdiri dari tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisa data, dan tahap pelaporan hasil penelitian.⁵³

Pada tahap pralapangan, penulis melakukan persiapan yang terkait dengan kegiatan penelitian, misalnya mengirim surat ijin ke tempat penelitian. Apabila tahap pralapangan sudah berhasil dilaksanakan, penulis melanjutkan ke tahap berikutnya sampai pada tahap pelaporan penelitian tentang Manajemen konflik di lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

78. ⁵²Sartono Kartodirejo, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Grafindo, 1986, h.

⁵³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 170.

3. Prosedur Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan beberapa tahap, persiapan, analisis, penyajian hasil analisis.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Matthew B. Milles terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁵⁵

a. Reduksi data

Pada tahap reduksi data ini, penulis melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Penulis melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan masyarakat sekitar SMP Islam Nurul Ihsan.
- 2) penulis melakukan wawancara.

⁵⁴Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2010, h. 244.

⁵⁵Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992, h. 15.

3) Penulis mengumpulkan dokumentasi pendukung.

b. Penyajian data

Pada tahap penyajian data ini, penulis melakukan tahapan-tahapan berikut:

- 1) Penulis menyusun hasil wawancara
- 2) Penulis memilih hasil wawancara yang akan digunakan sebagai data.
- 3) penulis membuat kesimpulan sementara.

c. Verifikasi data (conclusion drawing)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan verifikasi data dengan teknik triangulasi sumber. Penulis memberikan pertanyaan yang sama melalui wawancara kepada narasumber yang berbeda. Waktu dan tempat wawancara juga berbeda. Sehingga diperoleh hasil wawancara.

Secara garis besar prosedur penelitian merupakan langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penyelesaian.

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan atau pemeriksaan diperlukan untuk menjamin keabsahan data. Pemeriksaan data menganut teknik tertentu yang dipandang sesuai dengan model penelitian yang dilakukan. Pada penelitian kualitatif, ada

berbagai model teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian.⁵⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi sumber.

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara penulis mengadakan pengamatan secara teliti dan cermat, serta berkesinambungan. Dengan cara seperti ini maka kepastian data dari urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁵⁷ Untuk mendukung cara ini, penulis banyak membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka diharapkan wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/terpercaya atau tidak.

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, yang penulis gunakan yaitu: Triangulasi sumber, dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda, namun dengan teknik yang sama.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 327.

⁵⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2010, h. 272.

E. Kerangka Konsep Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya

SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya merupakan sekolah yang berada di Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya. Sekolah ini berdiri pada tahun 2012. SMP Islam Nurul Ihsan merupakan sekolah yang berstatus swasta yang berada dibawah naungan Yayasan Nurul Ihsan dengan Kepala Sekolah Drs. Masripani, dengan status kepala sekolah penunjukan SK yayasan.

Yayasan Pendidikan Nurul Ihsan sebagai yayasan yang menaungi SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, juga menaungi dua sekolah lain, yakni TK/TPA Nurul Ihsan dan SD Islam Nurul Ihsan Palangkaraya. Lokasi SD Islam Nurul Ihsan Palangkaraya berada di Jl dr. Murjani, namun bangunan SD Islam berada terpisah dari lingkungan TK/TPA dan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

TK/TPA dan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya menggunakan bangunan sekolah yang sama dalam proses pembelajarannya. Bangunan sekolah pada pagi hingga siang hari digunakan oleh SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, sedangkan pada sore hari digunakan oleh TK/TPA Islam Nurul Ihsan Palangkaraya. Sehingga, lingkungan Yayasan Nurul Ihsan Palangkaraya, selalu diisi dengan kegiatan pembelajaran dari pagi hingga sore hari.

2. Gambaran Umum Tentang Lingkungan Masyarakat SMP Islam Nurul Ihsan

a. Gambaran Singkat lingkungan sekitar sekolah

Lingkungan masyarakat sekitar SMP ISLAM Nurul Ihsan palangkaraya merupakan lingkungan padat penduduk, berada di tengah-tengah 2 gang yaitu gang wijaya dan gang bunga berada di RT 05 dan RW VI.

b. Akses jalan masyarakat lingkungan sekitar sekolah

Akses jalan utama yang digunakan warga masyarakat sekitar lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya adalah melalui 2 gang yaitu Gang Bunga dan Gang Wijaya, dengan kondisi jalan untuk gang bunga sudah mengalami perbaikan yang dilakukan oleh Dinas PU dengan jenis jalan beraspal, namun untuk gang wijaya masih berbentuk jalan dari bahan kayu yang pada beberapa bagian jalan mengalami kerusakan dan oleh warga masyarakat diperbaiki secara bergotong royong.

Sebelum akses jalan yang melewati sekolah ditutup, masyarakat juga menjadikan jalan tersebut sebagai jalan utama keluar, bahkan sebelumnya karena belum adanya larangan penggunaan halaman sekolah untuk umum banyak warga masyarakat sekitar yang menggunakan halaman sekolah untuk tempat parkir mobil pribadi dan mobil barang.

c. Akses jalan warga sekolah

Berada di lingkungan padat penduduk secara otomatis peserta didik yang ada di SMP Islam Nurul Ihsan kebanyakan dari masyarakat lingkungan sekitar, ada yang berasal dari masyarakat terdekat dengan sekolah, ada yang berasal dari masyarakat yang jauh yaitu komplek

bengkel, puntun, gang sayur. Dewan guru juga ada yang berdomisili dekat dengan sekolah sehingga akses jalan yang digunakan tidak berbeda dengan yang digunakan masyarakat. Pihak sekolah melihat hal tersebut untuk memberi kemudahan kepada peserta didik dan dewan guru membuat 3 pintu masuk dengan diberi pagar yang akan dibuka apabila proses pembelajaran aktif mulai pukul 05.30 s.d 17.00 Wib, dari hari senin s.d sabtu, dan tiga pintu tersebut hanya digunakan untuk akses jalan guru dan peserta didik.

d. Bahasa komunikasi warga masyarakat dengan warga sekolah

Masyarakat lingkungan sekitar sekolah mayoritas berasal dari suku banjar, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa banjar, namun bahasa komunikasi lain disesuaikan dengan lawan bicara, karena ada beberapa guru yang berasal dari suku jawa, dayak, sehingga bahasa Indonesia tetap jadi bahasa pengantar komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama pada pertemuan/rapat yang diadakan di sekolah.

e. Interaksi warga sekolah dengan masyarakat.

Interaksi warga sekolah dan masyarakat sejauh ini berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan terlibatnya pihak warga sekolah di beberapa kegiatan atau acara yang dilaksanakan warga masyarakat, dan penyediaan tempat yang bisa digunakan untuk acara warga seperti pada acara perkawinan, pemilihan RT bahkan PILKADA. Namun demikian tidak semua warga masyarakat pro terhadap pihak sekolah, warga masyarakat

yang kontra menutup diri terhadap interaksi yang dilakukan pihak sekolah, menolak undangan dan tidak pernah bergabung pada kegiatan yang diadakan pihak sekolah dengan masyarakat. Sedangkan untuk komunikasi guru-guru tidak semua guru tiap harinya berinteraksi dengan masyarakat, karena kebanyakan guru di SMP Islam Nurul Ihsan bertempat tinggal jauh dari sekolah, sehingga saat kegiatan yang dilakukan bersama barulah terjadi komunikasi.

f. Mata pencaharian masyarakat sekitar sekolah

Mata pencaharian penduduk beragam; sebagai tukang rumah, tukang cat, pedagang, dan supir. Sedangkan mata pencaharian sebagian istri sebagai pengupas bawang yang waktunya hampir dari pagi sampai sore dihabiskan untuk bekerja. Tempat bekerjanya pun dekat dengan sekolah sehingga untuk akses jalan mereka sering menggunakan jalan yang melalui sekolah. Masyarakat yang pekerjaannya sebagai supir, setelah selesai bekerja/istirahat, mereka memarkir mobil di depan bahkan di dalam halaman sekolah.

B. Penyajian Data

1. Jenis kebijakan yang diambil pihak SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya sehingga memicu konflik:

a. Penutupan Akses Jalan

SMP Islam Nurul Ihsan terletak di tengah lingkungan padat penduduk di Jl. Dr. Murjani. Masyarakat sekitar terbiasa menggunakan akses jalan melalui 2 gang sempit yaitu Gg. Bunga dan Gg. Wijaya. Sehingga, sebelum SMP Islam Nurul Ihsan berdiri, masyarakat

menggunakan jalan alternatif dengan melalui lokasi sekolah yang terlebih dulu digunakan untuk pendidikan TKA, TPA, TQA Nurul Ihsan pada sore hari.

Lokasi bangunan tempat berlangsungnya Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) SMP Islam Nurul Ihsan menjadi satu dengan TKA, TPA, TQA Nurul Ihsan, namun berbeda waktu SMP pada pagi sampai siang hari dilanjutkan TKA, TPA, TQA Nurul Ihsan dari jam 15.00 s.d 17.00 Wib. untuk kelancaran dan keamanan pihak sekolah merasa perlu melakukan penutupan akses jalan alternatif yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar. Beberapa pertimbangan seperti: menghindari para peserta didik bebas keluar masuk, menghindari orang asing masuk pada saat pembelajaran sedang berlangsung, agar fokus belajar tidak terganggu merupakan hal yang dipikirkan oleh pihak sekolah.

Lingkungan sekolah yang ideal adalah lingkungan kondusif yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dengan baik. Jika akses jalan alternatif yang melalui lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan tetap dibuka untuk umum, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung karena siapa saja bebas keluar masuk lingkungan sekolah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak sekolah kemudian ingin mengambil sebuah kebijakan penutupan akses jalan untuk umum. Pengambilan kebijakan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh sekolah saja, sebab akses jalan alternatif yang melewati lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya ini adalah akses jalan yang biasa

digunakan masyarakat, Pengambilan kebijakan dilakukan pihak sekolah dengan mengundang perwakilan dari masyarakat, yang kemudian dilakukan sosialisasi agar seluruh masyarakat yang biasa menggunakan akses jalan alternatif tersebut mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Masripani, terdapat beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah namun memicu beberapa konflik di masyarakat, yakni:

1. Penutupan akses jalan yang sering digunakan oleh masyarakat karena melalui halaman sekolah;
2. Pelarangan penggunaan fasilitas milik sekolah oleh umum;
3. Pemasangan pembatas lahan sekolah.⁵⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan sebanyak tiga jenis kebijakan dari pihak sekolah yang memicu konflik di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut sebenarnya tidak diputuskan sepihak saja, namun telah ada sosialisasi dari pihak sekolah kepada masyarakat. Pengambilan kebijakan pun tidak hanya diputuskan oleh satu orang (kepala sekolah) saja, para dewan guru pun terlibat untuk mempertimbangkan dan memberikan sumbangan pikiran sebelum kebijakan tersebut diambil. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran dan satpam di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya berikut:

Informan 1: Waka Bidang Kurikulum

⁵⁸ Wawancara dengan Masripani usia 50 tahun di Palangka Raya, 9 Februari 2016.

Menurut Sri Widayati, ia menyetujui kebijakan sekolah untuk menutup akses jalan yang biasa digunakan masyarakat sebelum SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya pindah ke lokasi tersebut. Menurutnya, jika akses jalan tersebut tidak ditutup, maka kegiatan belajar mengajar akan terganggu sebab lingkungan sekolah dijadikan akses jalan untuk umum. Tidak menutup kemungkinan akan ada kekacauan yang timbul jika akses jalan tersebut tidak ditutup untuk umum.

“...Sangat setuju, karena demi keamanan sekolah ataupun kegiatan KBM tidak terganggu.”⁵⁹

Informan 2: Waka Bidang Sarana dan Prasarana

Tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah dan waka bidang kurikulum, waka sarana dan prasarana pun mengatakan persetujuannya jika akses jalan untuk umum ditutup. Menurut Aprillia Rahmadiyah .S, jika akses jalan ditutup untuk umum, peserta didik dapat terpantau oleh pihak sekolah. Ia juga mengatakan bahwa sebelum akses jalan ditutup dan banyak orang bebas keluar masuk lingkungan sekolah, sering terjadi kerusakan fasilitas-fasilitas sekolah karena orang-orang iseng.

“Jelas setuju, lebih aman dan juga kegiatan pembelajaran lebih aman, selain peserta didik tidak bisa keluar masuk secara bebas, masyarakat juga tidak bebas masuk semauanya. Sarana sekolah juga jadi lebih terjaga, karena saya sendiri mengalami kesulitan karena waktu belum ditutup jalan secara umum ada saja setiap hari barang

⁵⁹ Wawancara dengan Sri Widayati usia 48 tahun di Palangka Raya, 13 februari 2016.

sekolah yang rusak. Pot bunga pecah, dinding yang dicoret, papan lantai halaman yang patah, jadi intinya setuju saja.”⁶⁰

Informan 3: Waka Bidang Kesiswaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka bidang kesiswaan di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, Taufik Adji Sasono, ia juga menyetujui jika pihak sekolah menutup akses jalan untuk umum. Menurutnya, penutupan akses jalan untuk umum adalah upaya pihak sekolah untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah.

“Menurut saya baik dan setuju saja, karena tidak semua pengguna jalan bertanggungjawab dengan baik jadi untuk menjaga keamanan dan kebaikan semua lebih baik memang ditutup akses jalan yang digunakan secara umum yang melalui halaman sekolah.”⁶¹

Informan 5: Waka Bidang Humas

Waka Bidang Humas memiliki peran sebagai penghubung langsung antara pihak sekolah dan masyarakat. Muhammad Syahren sebagai waka humas di SMP Islam Nurul Ihsan mengatakan bahwa penutupan akses jalan untuk umum lumrah dilakukan karena akses jalan tersebut masih termasuk tanah milik sekolah. Selain itu, penutupan akses jalan tersebut juga untuk menghindari orang-orang asing di luar jam pelajaran serta mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan jika masyarakat umum bebas keluar masuk lingkungan sekolah.

⁶⁰ Wawancara dengan Aprilia Rahmadiyah S usia 26 tahun di Palangka Raya, 12 Februari 2016.

⁶¹ Wawancara dengan Taufik Adji Sasono usia 24 tahun di Palangka Raya, 16 Februari 2016.

Menurut saya, memang wajar-wajar saja karena itu tanah sekolah dan hak sekolah menutupnya, karena dikhawatirkan apabila dilalui atau dibiarkan menjadi jalan bebas maka akan masuk dan lewat para pemuda yang diluar sekolah maka dengan mudahnya menawarkan barang-barang haram yang tidak diinginkan, selain itu hak sekolah dengan tujuan untuk membatasi agar anak-anak tidak keluar dan tidak dapat melakukan pertemuan dengan anak-anak lain yang diluar dari sekolah SMP Islam Nurul Ihsan, dan juga dapat mengontrol anak-anak ketika istirahat dan begitu juga ketika malam hari lingkungan sekolah bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan lain-lainnya.⁶²

Informan 6: Guru Mata Pelajaran

Wawancara juga dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa orang guru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana seorang guru mata pelajaran terlibat dan mengetahui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Rina Arif, salah seorang guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris, ia mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan penutupan akses jalan untuk umum.

Penutupan jalan yang biasa digunakan untuk masyarakat saya rasa bisa saja, karena apabila jalan sekolah juga digunakan untuk jalan umum maka akan mengganggu proses belajar mengajar (KBM) serta keamanan dan ketenangan di sekolah juga mungkin akan terganggu. Namun yang perlu pihak sekolah perhatikan juga kalau jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat ditutup hendaknya pihak sekolah harus memberikan jalan alternative untuk masyarakat agar kegiatan masyarakat sehari-hari tidak terganggu.⁶³

Informan 7: Guru Mata Pelajaran

Wawancara juga dilakukan oleh penulis kepada guru lain yang berstatus sebagai guru yang menambah jam untuk syarat sertifikasi di SMP

⁶² Wawancara dengan Muhammad Syahren usia 45 tahun di Palangka Raya, 15 Februari 2016.

⁶³ Wawancara dengan Rina Arif usia 44 tahun di Palangka Raya, 17 Februari 2016.

Islam Nurul Ihsan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana seorang guru luar melibatkan diri dan mengetahui dengan jelas kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Sri Utami, guru mata pelajaran matematika ini menyatakan bahwa ia juga mengetahui jenis kebijakan yang memicu konflik tersebut.

“Kebijakan yang diambil saya tahu dan baik saja, namun ketika kebijakan tersebut dilaksanakan kemudian menimbulkan permasalahan berarti ada langkah yang kurang yang harus diperhatikan pihak sekolah.”⁶⁴

Informan 8: Petugas Keamanan

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah sekolah, tentu melibatkan banyak pihak, tidak terkecuali petugas keamanan atau satpam. Menurut Zulkifli, satpam di SMP Islam Nurul Ihsan, ia juga mengetahui kebijakan tersebut karena pihak sekolah mengundang seluruh elemen dalam sekolah tersebut pada saat rapat pengambilan kebijakan.

Menurut Zulkifli, penutupan akses jalan untuk umum yang merupakan salah satu kebijakan pihak sekolah dan perwakilan masyarakat, sangat tepat. Ia mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan fasilitas sekolah saat akses jalan belum ditutup untuk umum.

“Kalau saya pribadi sangat setuju, karena yang saya tahu waktu jalan belum ditutup untuk umum, banyak terjadi penyalahgunaan sarana sekolah, bahkan sampai rusak, bahkan halaman sekolah pada malam hari digunakan untuk anak-anak warga masyarakat main sampai tengah malam, karena saya bertempat tinggal dekat

⁶⁴ Wawancara dengan Sri Utami usia 46 tahun di Palangka Raya, 18 Februari 2016.

dengan sekolah sehingga melihat secara langsung namun untuk menegur sulit dan tidak dihiraukan.⁶⁵

Menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin sangatlah penting agar siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja yang terbaik.⁶⁶ Penutupan akses jalan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah merupakan upaya yang dilaksanakan untuk menjaga ketertiban berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah. Penutupan akses jalan tersebut juga merupakan upaya pihak sekolah menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Akses jalan yang ditutup oleh pihak sekolah tersebut sebelumnya memang merupakan akses jalan umum yang biasa digunakan masyarakat sebagai jalan pintas. Jika akses jalan tidak ditutup untuk umum, maka gangguan-gangguan akan muncul pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Gangguan tersebut misalnya, mudahnya orang-orang yang bukan warga sekolah masuk dan berbaur di lingkungan sekolah pada saat proses pembelajaran, hal ini bisa saja memicu keributan. Gangguan lain adalah siswa dapat dengan mudah keluar masuk tanpa terawasi karena pihak sekolah tidak bisa melakukan pengawasan penuh seperti penjagaan di depan akses jalan karena akses jalan tidak hanya digunakan oleh warga sekolah.

⁶⁵ Wawancara dengan Zulkifli usia 28 tahun di Palangka Raya, 11 Februari 2016.

⁶⁶ Zanwir, *Upaya Menciptakan Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Efektif dalam Pembelajaran: Peningkatan kinerja Kepala Sekolah dalam Program MBS* (dalam <http://bdkpadang.kemenag.go.id>.) diakses hari Senin, 3 Oktober 2016, Pukul 09.15 WIB.

b. Pelarangan Penggunaan Fasilitas Sekolah oleh Masyarakat Umum

Fasilitas sekolah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak sekolah dan diperuntukkan manfaatnya bagi siswa sekolah tersebut. Fasilitas di SMP Islam Nurul Ihsan, ada yang memang telah tersedia di lingkungan komplek Agra Budi dan ada yang memang baru dilengkapi oleh pihak sekolah. Keberadaan fasilitas yang telah tersedia di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya inilah yang sering digunakan oleh masyarakat umum.

Komplek Agra Budi yang halamannya saat ini digunakan oleh SMP Islam Nurul Ihsan sebagai tempat untuk kegiatan sekolah, dulunya adalah lahan yang setiap sore atau pada hari libur digunakan masyarakat sekitar untuk tempat bermain, bersantai dan parkir kendaraan. Kebiasaan masyarakat ini rupanya terus berlanjut bahkan setelah SMP Islam Nurul Ihsan pindah lokasi ke Komplek Agra Budi. Hal ini dirasa cukup mengganggu oleh pihak sekolah karena pada sore hari terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Ditambah lagi, banyak remaja yang tidak ikut menjaga kebersihan sekitar lapangan. Sampah-sampah sering ditemukan setelah halaman digunakan oleh remaja sekitar. Sehingga ketika halaman ingin digunakan pada pagi hari untuk kegiatan peserta didik, peserta didik perlu membersihkan terlebih dahulu dari sampah-sampah.

Informan 1: Waka Bidang Kurikulum

Menurut Sri Widayati, kebijakan pelarangan penggunaan fasilitas sekolah untuk umum adalah kebijakan yang tepat. Sebab, fasilitas sekolah hanya dapat digunakan oleh peserta didik saja.

“Sangat tepat dan setuju, karena fasilitas sekolah adalah aset sekolah yang hanya bisa digunakan oleh siswa-siswi SMP Islam Nurul Ihsan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak terganggu oleh pihak luar.”⁶⁷

Informan 2: Waka Bidang Sarana dan Prasarana

Waka Bidang Sarana dan Prasarana SMP Islam Nurul Ihsan menyatakan persetujuannya mengenai kebijakan sekolah melarang penggunaan fasilitas sekolah untuk umum. Sebab, yang terjadi selama ini pada saat kebijakan pelarangan penggunaan fasilitas belum ditetapkan, banyak masyarakat sekitar menggunakan fasilitas sekolah secara tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kerusakan.

“Setuju sekali, kebanyakan remaja sekitar menggunakan fasilitas olahraga terlalu bebas tanpa aturan sehingga sarana sekolah banyak yang rusak, ketika pada sore hari peserta didik ingin menggunakan untuk kegiatan ekstra sering terganggu bahkan takut. Jadi tepat sekali kebijakan yang diambil sekolah dalam hal ini.”⁶⁸

Informan 3: Waka Bidang Kesiswaan

Menurut Waka Bidang Kesiswaan, telah beberapa kali sarana milik sekolah yang rusak karena digunakan sembarangan oleh remaja sekitar. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada sore hari di lapangan milik sekolah juga menjadi terganggu, karena halaman sekolah dijadikan lahan parkir oleh masyarakat umum. Menurutnya, sangat tepat jika sekolah mengambil kebijakan pelarangan penggunaan fasilitas sekolah untuk umum.

⁶⁷ Wawancara Sri Widayati usia 48 tahun di Palangka Raya, 13 Februari 2016.

⁶⁸ Wawancara Aprilia Rahmadiyah S usia 26 tahun. di Palangka Raya, 12 Februari 2016.

“Setuju, karena yang saya lihat banyak sarana yang hancur ketika digunakan secara bebas oleh remaja yang bukan peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler terganggu karena fasilitas banyak yang rusak dan halaman yang dipakai untuk parkir.”⁶⁹

Informan 4: Waka Bidang Humas

Waka Bidang Humas SMP Islam Nurul Ihsan juga menyatakan persetujuan mengenai kebijakan penggunaan fasilitas sekolah untuk umum. Ia menambahkan, jika fasilitas sekolah dapat digunakan oleh masyarakat umum, tidak menutup kemungkinan jika lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan akan menjadi kotor oleh sampah karena biasanya lapangan olahraga digunakan dengan tidak bertanggung jawab oleh remaja-remaja sekitar yang bermain dan sambil makan minum.

“Sangat tepat sekali karena apabila dipakai oleh orang lain yang bukan peserta didik SMP Islam Nurul Ihsan tentunya tidak ada rasa kepemilikan, bisanya memakai saja bahkan mungkin bisa merusak dan tidak ada tanggung jawabnya dan juga tidak bisa menjaga lingkungan seperti membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan sekolah menjadi terlihat kotor, jadi apabila ada remaja yang tidak bersekolah di SMP Islam Nurul Ihsan ini menggunakan lapangan olah raga wajib ditegur karena bukan tempat umum.”⁷⁰

Informan 5: Guru Mata Pelajaran

Salah satu guru mata pelajaran di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya mengatakan bahwa kebijakan tersebut adalah hal yang baik. Namun, tentu pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, remaja sekitar sudah terbiasa menggunakan lapangan SMP Islam Nurul

⁶⁹ Wawancara dengan Taufik Adji Sasono usia 24 tahun di Palangka Raya, 16 februari 2016.

⁷⁰ Wawancara dengan Muhammad Syahren usia 45 tahun di Palangka Raya, 15 Februari 2016.

Ihsan untuk bermain. Menurutnya, pihak sekolah perlu melakukan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

Pelarangan penggunaan halaman sekolah dan fasilitas olah raga oleh remaja di lingkungan sekolah saya rasa sangat baik, walaupun itu agak sulit dilakukan. Pelarangan itu mungkin bisa dilakukan dengan pemberitahuan secara langsung atau pihak sekolah yang mengantisipasi supaya fasilitas itu tidak digunakan yaitu dengan cara mengunci pagar pembatas pada sore hari.⁷¹

Informan 6: Guru Mata Pelajaran

Guru lainnya, Sri Utami, juga menyatakan persetujuannya mengenai kebijakan sekolah melakukan pelarangan penggunaan fasilitas sekolah untuk umum.

“Tepat biar lebih aman.”⁷²

Informan 7: Petugas Keamanan

Zulkifli, petugas keamanan di SMP Islam Nurul Ihsan menyatakan bahwa sebelum sekolah menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan fasilitas sekolah untuk umum, banyak terjadi hal-hal yang mengganggu bagi kegiatan belajar mengajar. Halaman sekolah yang luas, biasa digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan parkir, sehingga ketika upacara bendera dan senam pagi dilaksanakan, peserta didik harus berhimpitan dengan kendaraan yang diparkir sembarangan.

“Setuju, halaman sekolah sebelum ada pelarangan penggunaan secara umum tidak terjaga dengan baik, remaja menggunakan untuk bermain namun tidak menjaga sarana sekolah sehingga sering terjadi kerusakan, selain itu halaman juga digunakan sebagai tempat parkir mobil, sehingga ketika pagi hari halaman akan digunakan penuh dengan mobil yang parkir, sehingga kegiatan

⁷¹ Wawancara dengan Rina Arif usia 44 tahun di Palangka Raya, 17 Februari 2016.

⁷² Wawancara dengan Sri Utami usia 46 tahun di Palangkaraya, 18 Februari 2016.

sekolah baik itu upacara, senam pagi dan praktik olahraga peserta didik terganggu.⁷³

Pelarangan penggunaan halaman sekolah untuk umum dilakukan karena halaman sekolah merupakan sarana yang dimiliki sekolah dan difungsikan untuk proses pembelajaran. Pada saat halaman sekolah masih dengan bebas digunakan sebagai tempat bermain dan kumpul-kumpul remaja sekitar, banyak terjadi kerusakan-kerusakan dan tidak terjaganya kebersihan lingkungan sekolah.

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal.⁷⁴ Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan yang optimal oleh pihak SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya adalah melalui pelarangan penggunaan halaman sekolah untuk umum. Hal ini dilakukan agar kebersihan lapangan tetap terjaga pada saat hendak digunakan, tidak terjadi konflik lain antara siswa pada saat melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sore hari dengan remaja sekitar yang juga bermain di halaman tersebut dan menjaga agar tidak ada fasilitas lain yang dirusak atau digunakan secara tidak bertanggung jawab.

c. Pemasangan Pembatas Lahan

⁷³ Wawancara dengan Zulkifli usia 28 tahun di Palangka Raya, 11 Februari 2016.

⁷⁴ <https://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-sarana-dan-prasarana-pendidikan/> diakses pada hari Senin, 3 Oktober 2016, Pukul 10.25 WIB.

Lahan milik SMP Islam Nurul Ihsan merupakan lahan yang dihibahkan kepada pihak sekolah. Lahan ini luasnya mencapai 13443 m². Lahan ini berada di lingkungan PT Agra Budi. Sehingga, halaman atau lapangan kantor Agra Budi yang terletak di pinggir Jl. Dr. Murjani digunakan sebagai lapangan untuk kegiatan peserta didik seperti upacara bendera, senam pagi dan kegiatan ekstrakurikuler.

Lahan yang digunakan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya berada di tengah pemukiman penduduk. Rumah-rumah warga bahkan hampir berdempetan dengan bangunan sekolah. Bahkan dari hasil observasi peneliti, terdapat beberapa warga yang mendirikan bangunan di lahan milik sekolah. Dinding belakang ruang kelas pun digunakan warga seenaknya karena berhadapan langsung dengan pemukiman warga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kebijakan pembatasan lahan perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Kebijakan tersebut perlu dilakukan agar batas-batas lahan milik sekolah menjadi jelas dan tidak digunakan sembarangan oleh orang lain.

Informan 1: Waka Bidang Kurikulum

Menurut Sri Widayati, Waka Kurikulum di SMP Islam Nurul Ihsan, ia sependapat dengan kebijakan sekolah mengenai pembatasan lahan. Pihak sekolah perlu melakukan pembatasan lahan agar lahan yang digunakan jelas kepemilikannya, tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan. Selain itu, menurutnya kejelasan tentang batas-batas lahan ini mempermudah untuk manajemen pengurusan pajak.

“Sangat setuju, supaya tidak terjadi tumpang tindih lahan dan melengkapi manajemen pajak dengan batas yang jelas.”⁷⁵

Informan 2: Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana

Bhinarso menyatakan bahwa pihak Dinas Pendidikan Kota pernah menyarankan pihak sekolah untuk memperjelas kepemilikan lahan. Hal itu perlu dilakukan agar menghindari permasalahan yang dapat muncul karena ketidakjelasan lahan milik sekolah.

“Sekolah-sekolah yang berstatus swasta biasanya kepemilikan lahannya banyak yang hanya bersifat hibah, sehingga apabila tidak ada bukti fisik berupa sertifikat yang terdaftar di notaris, status kepemilikannya lemah dan bisa saja apabila ada pihak yang menggugat menjadi kalah di persidangan.”⁷⁶

Informan 3: Waka Bidang Sarana dan Prasarana

Senada dengan Waka Kurikulum, Aprillia Rahmadiyah juga mengatakan kebijakan mengenai pembatasan lahan ini perlu dilakukan pihak sekolah. Apalagi ia melihat ada beberapa warga yang mendirikan bangunan di tanah milik sekolah. Hal ini jika tidak segera ditindaklanjuti akan menimbulkan permasalahan baru.

“Mengenai kebijakan ini saya juga setuju, karena biar ada kejelasan batas lahan yang dimiliki sekolah, karena sekolah terus melakukan pembangunan, selain itu penduduk di sekitar lingkungan sekolah juga semakin padat, bahkan ada yang saya lihat sudah ada bangunan yang dibangun di lahan milik sekolah, untukantisipasi

⁷⁵ Wawancara Sri Widayati usia 48 tahun di Palangka Raya, 13 Februari 2016.

⁷⁶ Wawancara dengan Bhinarso usia 50 tahun di Palangka Raya, 18 April 2016.

pada hal-hal yang tidak diinginkan jadi hal tersebut perlu dilakukan.”⁷⁷

Informan 4: Waka Bidang Kesiswaan

Waka Bidang Kesiswaan menyatakan bahwa kebijakan ini sangat tepat, karena lingkungan di sekitar SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya semakin padat, sehingga kebijakan ini dianggap sebagai salah satu tindakan antisipasi agar tanah milik sekolah tidak digunakan sembarangan oleh masyarakat sekitar.

“Tepat sekali, karena pembangunan ruangan terus dilakukan pihak sekolah dan masyarakat sekitar sekolahpun semakin padat dipenuhi bangunan rumah-rumah, jadi untuk keamanan lahan harus ada pembatas yang jelas sesuai ukuran tanah yang ada disertifikat yang dimiliki pihak sekolah.”⁷⁸

Informan 5: Waka Bidang Humas

Muhammad Syahren mengatakan bahwa tanah milik sekolah sangat luas dan berada di tengah lingkungan padat penduduk. Kebijakan mengenai pembatasan lahan ini menurutnya menjadi salah satu tindakan untuk keamanan dan kejelasan agar lahan milik sekolah tidak tumpang tindih dengan milik warga.

“Baik dan setuju setuju saya lahan hibah milik sekolah sangat luas dan berada di tengah lingkungan masyarakat padat penduduk, penduduk sekitar juga semakin padat membangun rumah jadi untuk keamanan dan kejelasan lahan milik sekolah perlu diberi batas yang jelas agar tidak tumpang tindih dan saling mengakui.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Aprilia Rahmadiyah S. Usia 26 tahun di Palangka Raya, 12 Februari 2016.

⁷⁸ Wawancara dengan Taufik Adji Sasono usia 24 tahun di Palangka Raya, 16 Februari 2016.

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Syahren usia 45 tahun di Palangka Raya, 15 Februari 2016.

Informan 6: Guru Mata Pelajaran

Rina Arif, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya menyatakan bahwa kebijakan pembatasan lahan ini perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Sebab, SMP Islam Nurul Ihsan adalah salah satu sekolah yang sedang berada dalam proses pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik. Pembangunan secara fisik, seperti penambahan ruang kelas gencar dilakukan sekolah ini sehingga kebijakan ini adalah cara pihak sekolah mengantisipasi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari yang berhubungan dengan batas-batas lahan.

“Penutupan batas terhadap lahan yang dimiliki sekolah saya rasa juga perlu. Agar apabila pihak sekolah ingin mengembangkan sekolah dalam hal ini pengembangan pembangunan gedung ke depannya tidak ada masalah di kemudian hari”.⁸⁰

Informan 7: Petugas Keamanan

Zulkifli menyatakan persetujuannya terhadap pembatasan lahan oleh pihak sekolah. Sebab, ia melihat telah ada beberapa warga yang membangun di lahan milik sekolah. Bahkan menurutnya, di belakang dinding ruang kelas yang berhadapan dengan pemukiman warga, digunakan sebagai tempat menggantung barang-barang milik mereka.

“Mengenai kebijakan ini saya juga setuju, karena ada beberapa bangunan rumah warga masyarakat yang dibangun di atas lahan sekolah, bahkan dinding bangunan kelas bagian belakang ada yang dijadikan tempat jemur pakaian, sehingga sangat tepat kalau dilakukan pembatasan terhadap lahan milik sekolah.”⁸¹

2. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya

⁸⁰ Wawancara dengan Rina Arif usia 44 tahun di Palangka Raya 17 Februari 2016.

⁸¹ Wawancara dengan Zulkifli usia 28 tahun di Palangkaraya, 11 Februari 2016.

Pengambilan kebijakan oleh pihak sekolah tidak dilakukan secara sepihak saja. Pihak sekolah menyadari bahwa kebijakan yang diambil berkaitan dengan masyarakat sekitar, maka pengambilan kebijakan pun harus melibatkan seluruh pihak yang terkait. Pihak sekolah mengundang perwakilan dari masyarakat sekitar seperti ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat sekitar, dan beberapa warga masyarakat.

Sosialisasi juga dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat sekitar mengenai kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil pihak sekolah memang tidak bisa diterima begitu saja oleh sebagian masyarakat. Karena kebijakan tersebut mengubah kebiasaan masyarakat sekitar yang berkaitan dengan bangunan sekolah.

a. Penutupan Akses Jalan

Masyarakat sekitar SMP Islam Nurul Ihsan adalah orang-orang yang menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Salah satu kebijakan yakni penutupan akses jalan alternatif yang biasa digunakan masyarakat umum melalui lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan pada mulanya tentu menimbulkan pro kontra.

Masyarakat yang biasa menggunakan jalan alternatif ini, kadang harus berputar balik saat melihat spanduk yang dibuat oleh pihak sekolah untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai penutupan jalan tersebut. Sebagian masyarakat yang kontra beranggapan bahwa kebijakan tersebut membuat mereka harus putar arah agak jauh menuju rumah mereka. Sebagian lainnya yang pro, beranggapan bahwa kebijakan ini memang layak diambil oleh pihak sekolah jika mengingat bahwa lingkungan sekolah perlu

suasana yang fokus dan kondusif bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Informan 1: Yanti, S.E. (Masyarakat sekitar)

Salah satu masyarakat yang menjadi narasumber adalah Yanti. Ia termasuk salah satu masyarakat yang menyetujui kebijakan penutupan akses jalan untuk umum. Ia beranggapan bahwa jalan alternatif yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar termasuk salah satu sarana milik sekolah. Penutupan jalan tersebut menurutnya merupakan upaya pihak sekolah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan sekolah.

“Tanggapannya baik dengan menutup jalan yang biasa digunakan untuk masyarakat, karena jalan yang biasa digunakan masyarakat merupakan fasilitas sekolah dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jika jalan itu masih digunakan secara umum. Misalnya remaja disekitar sekolah menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti minum-minuman keras, tempat berpacaran dan juga mencegah hal-hal lain seperti kehilangan peralatan sekolah atau inventaris sekolah lainnya.”⁸²

Informan 2: Atim (Masyarakat sekitar)

Atim menyatakan hal yang senada dengan yang disampaikan oleh Yanti dalam hasil wawancara. Ia mengatakan bahwa penutupan akses jalan tersebut ditujukan agar lingkungan sekolah menjadi lebih aman.

“Setuju saja biar lebih aman, supaya tidak ada orang asing yang keluar masuk dan mengganggu siswa”⁸³

Informan 3: Halimatus Sa’diyah (Isteri Ketua RW Lama)

Halimatus Sa’diyah mengatakan persetujuannya mengenai kebijakan penutupan akses jalan alternatif oleh pihak sekolah. Namun, ia

⁸² Wawancara dengan Yanti usia 39 tahun di Palangka Raya, 20 Februari 2016.

⁸³ Wawancara dengan Atim usia 48 tahun di Palangka Raya, 20 Februari 2016.

mengusulkan jika suatu ketika terjadi musibah atau sedang ada perbaikan jalan yang biasa mereka gunakan, hendaknya jalan alternatif yang melalui lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan dapat dibuka untuk sementara.

“Setuju saja tapi kami minta apabila ada kondisi darurat dibuka, seperti perbaikan jalan, ada bencana kebakaran, dll.”⁸⁴

Informan 4: Isnaini (Ketua RT)

Narasumber berikutnya yang dipilih oleh peneliti adalah Ketua RT di lingkungan berdirinya SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya. Isnaini menyatakan bahwa kebijakan yang diambil sekolah mengenai penutupan akses jalan adalah hal yang wajar. Terlebih lagi jika mengingat bahwa akses jalan tersebut merupakan salah satu sarana yang digunakan peserta didik untuk menuju sekolah tersebut. Namun, ia juga menyatakan sedikit keberatan karena akses jalan yang ditutup tersebut adalah akses jalan alternatif yang biasa digunakan masyarakat agar lebih cepat sampai ke rumah.

“Setuju saja, karena menolak juga tidak bisa, karena itu punya sekolah walaupun kami agak kesulitan juga karena jalan alternatif yang ditutup tersebut.”⁸⁵

Informan 5: Kamila (Masyarakat sekitar)

Kamila berpendapat bahwa penutupan akses jalan alternatif membuat warga agak kesulitan karena harus berputar agak jauh. Ia juga

⁸⁴ Wawancara dengan Halimatus Sa'diyah usia 46 di Palangka Raya, 21 Februari 2016.

⁸⁵ Wawancara dengan Isnaini usia 43 tahun di Palangka Raya, 22 Februari 2016.

mengatakan bahwa pihak sekolah tidak melakukan sosialisasi mengenai penutupan akses jalan alternatif tersebut.

“Sebenarnya kami keberatan. Karena kami sering menggunakan jalan itu karena lebih dekat ke jalan raya. Sosialisasi juga tidak ada, gerbang langsung tiba-tiba terkunci. Akhirnya kami memutar agak jauh.”⁸⁶

Informan 6: Meilani (Masyarakat sekitar/Orang tua siswa)

Meilani mengatakan hal yang senada dengan Kamila, bahwa akses jalan tersebut sudah terbiasa digunakan sebagai akses jalan umum.

“Saya tidak setuju jika akses jalan ditutup. Kami *kan* sudah terbiasa menggunakan jalan di situ. Jarak antara rumah kami dan jalan raya jadi tidak terlalu jauh. Kalau akses jalan ditutup, kami harus berputar melewati jalan yang cukup jauh.”⁸⁷

Informan 7: Rusli (Masyarakat sekitar)

Rusli merupakan salah satu narasumber yang berpendapat bahwa penutupan akses jalan oleh pihak sekolah adalah tindakan yang memberatkan warga sekitar yang biasa menggunakan jalan alternatif tersebut. Ia mengatakan bahwa semenjak akses jalan alternatif ditutup, para warga yang biasa menggunakan jalan alternatif terpaksa harus memilih jalan yang agak jauh.

“Sebenarnya saya merasa kurang setuju. Dari dulu kan kami sering menggunakan jalan tersebut sebagai jalan alternatif. Tapi setelah jalan ditutup, kami terpaksa harus lewat jalan yang agak jauh.”⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan Kamalia usia 39 tahun di Palangka Raya, 23 Februari 2016.

⁸⁷ Wawancara dengan Meilani 42 tahun di Palangka Raya, 24 Februari 2016.

⁸⁸ Wawancara dengan Rusli usia 33 tahun di Palangka Raya, 25 Februari 2016.

Informan 8: Badrudin (Ketua RW yang baru)

Badrudin adalah Ketua RW yang baru saja mulai menjabat di lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya. Walaupun baru menjabat, ia berusaha mengetahui dan mengenali kondisi lingkungannya. Ia mengatakan bahwa kebijakan SMP Islam Nnurul Ihsan Palangkaraya menutup akses jalan untuk umum adalah tindakan yang wajar.

“Menurut saya kebijakan tersebut wajar saja diambil oleh pihak sekolah. Kalau akses jalan tidak ditutup, takutnya aktivitas belajar peserta didik terganggu.”⁸⁹

Informan 9: Hanafi (Warga yang melakukan perusakan pagar)

Hanafi adalah warga yang melakukan perusakan pagar milik sekolah yang menjadi tanda bahwa akses jalan tidak diperbolehkan untuk umum. Ia berpendapat bahwa akses jalan itu juga hak warga sekitar.

“Saya sangat tidak setuju kalau jalan ditutup. Karena jalan itu kan sudah lama digunakan oleh warga. Warga sudah terbiasa. Saya rasa warga juga punya hak menggunakan jalan itu..”⁹⁰

b. Pelarangan Penggunaan Sarana Milik Sekolah oleh Masyarakat Umum

Sarana milik SMP Islam Nurul Ihsan yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar adalah halaman sekolah. Penggunaan sarana tersebut, jika melalui proses izin seperti dijadikan sebagai TPS pada saat pemilihan ketua RT, Pilkada yang lalu, barangkali tidak menjadi masalah.

⁸⁹ Wawancara dengan Badrudin usia 60 tahun di Palangka Raya, 26 Februari 2016.

⁹⁰ Wawancara dengan Hanafi usia 48 tahun di Palangka Raya, 25 Februari 2016.

Penggunaan-penggunaan sarana yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu alasan pihak sekolah untuk mengambil kebijakan larangan penggunaan sarana milik sekolah.

Pada awal sosialisasi kebijakan ini, banyak remaja sekitar yang biasa bermain di halaman sekolah pada sore hari merasa tidak senang. Bahkan sebagai bentuk protes, mereka merusak sarana olah raga milik sekolah. Namun, lambat laun, setelah melalui berbagai upaya oleh pihak sekolah, protes-protes tersebut sudah tidak terjadi lagi.

Halaman sekolah juga sering dijadikan area parkir oleh masyarakat sekitar. Sehingga pada saat peserta didik ingin beraktifitas, mereka harus rela berdesakan di antara kendaraan-kendaraan tersebut. Pada awal kebijakan ini dibuat, hanya sebagian masyarakat saja yang sadar dan tidak memarkir kendaraannya di halaman sekolah. Sebagian lainnya masih acuh terhadap kebijakan tersebut.

Informan 1: Yanti, S.E. (Masyarakat sekitar)

Yanti mengemukakan pendapatnya secara pribadi mengenai kebijakan pelarangan penggunaan sarana ini. Ia menyatakan bahwa setiap sekolah berhak membuat kebijakan yang baik bagi sekolah tersebut. Menurutnya, jika sarana milik sekolah dibiarkan digunakan oleh pihak lain, maka apabila suatu saat terjadi kerusakan, akan sulit mencari orang yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.

“Untuk tanggapan masyarakat yang lain saya tidak tahu, sedangkan tanggapan saya sah-sah saja karena setiap sekolah mempunyai peraturan sendiri dan apabila dipakai atau digunakan secara umum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kerusakan

akan fasilitas sekolah akan sulit mencari siapa yang harus bertanggungjawab di kemudian hari.”⁹¹

Informan 2: Atim (Masyarakat sekitar)

Atim menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan sekolah melarang penggunaan sarana milik sekolah untuk umum. Karena berdasarkan yang ia ketahui, selama ini halaman SMP Islam Nurul Ihsan Palangara menjadi tempat *nongkrong* remaja sekitar hingga larut malam.

“Setuju saja biar lebih aman karena kebiasaan remaja sini suka *nongkrong* di halaman sekolah itu pas malam hari.”⁹²

Informan 3: Halimatus Sa’diyah (Isteri Ketua RW)

Halimatus Sa’diyah menyatakan hal yang senada dengan Yanti dan Atim bahwa kebijakan mengenai larangan penggunaan sarana milik sekolah untuk umum adalah upaya pihak sekolah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena selama ini halaman sekolah banyak disalahgunakan oleh remaja sekitar.

“Bagus untuk dilarang sehingga tidak terjadi yang tidak-tidak.

Selama ini *kan* halaman sekolah sering disalahgunakan anak-anak sekitar.”⁹³

Informan 4: Isnaini (Ketua RT)

Menurut ketua RT di lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan, kebijakan yang diambil sangat bagus karena ia sering melihat remaja-

⁹¹ Wawancara dengan Yanti usia 39 tahun di Palangka Raya, 20 Februari 2016.

⁹² Wawancara dengan Atim usia 48 tahun di Palangka Raya, 20 Februari 2016.

⁹³ Wawancara dengan Halimatus Sa’diyah usia 46 tahun di Palangka Raya, 21 Februari

remaja sekitar menggunakan halaman sekolah dengan tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan di halaman sekolah.

“Bagus saja. Karena yang saya lihat, kadang remaja sekitar sini suka membuang sampah jajan sembarangan pada saat bermain di halaman milik sekolah.”⁹⁴

Informan 5: Kamila (Masyarakat sekitar)

Kamila menyatakan kekurangsetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa remaja sekitar akan kekurangan lahan bermain jika pihak SMP Islam Nurul Ihsan melarang menggunakan fasilitas milik sekolah tersebut.

“Sebenarnya kurang setuju. Anak-anak sekitar sini kan kurang lahan untuk bermain. Kalau halaman sekolah tidak boleh digunakan mereka lagi, lalu mereka main di mana?”⁹⁵

Informan 6: Meilani (Masyarakat sekitar)

Meilani menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan sekolah tentang larangan penggunaan fasilitas sekolah untuk umum. Menurutnya, halaman sekolah sering digunakan remaja-remaja sekitar sebagai tempat bermain dan berkumpul. Jika halaman sekolah tidak diperbolehkan lagi untuk umum, maka remaja-remaja sekitar tidak memiliki tempat bermain.

⁹⁴ Wawancara dengan Isnaini usia 43 tahun di Palangka Raya, 22 Februari 2016.

⁹⁵ Wawancara dengan Kamalia usia 39 tahun di Palangka Raya, 23 Februari 2016.

“Saya kurang setuju kalau lapangan sekolah tidak diperbolehkan lagi digunakan oleh remaja sekitar. Kalau ditutup, remaja-remaja sekitar tidak punya tempat bermain lagi.”⁹⁶

Informan 7: Rusli (Masyarakat sekitar)

Rusli menyatakan ketidaksetujuannya jika pihak sekolah melarang masyarakat umum menggunakan halaman sekolah. Menurutnya, anak-anak sekitar menjadi tidak memiliki area bermain jika halaman sekolah tidak boleh digunakan. Halaman juga sering ia gunakan untuk memarkir mobil, sehingga sejak halaman tidak diperbolehkan lagi digunakan untuk umum, ia harus memarkir mobil di pinggir jalan.

“Kalau menurut saya hal itu agak kurang pas. Karena kasihan anak-anak sekitar sini yang ingin bermain dan berolah raga. Lalu, saya kan punya mobil yang biasa saya parkir di halaman sekolah. Nah, ketika sudah ada larangan, saya jadi bingung harus memarkir mobil saya di mana. Kadang malah saya parkir di pinggir jalan saja.”⁹⁷

Informan 8: Badrudin (Ketua RW yang baru)

Berbanding terbalik dengan pernyataan Rusli, Wahyuni menyatakan bentuk dukungannya terhadap kebijakan sekolah untuk melarang penggunaan halaman sekolah oleh masyarakat umum. Hal ini menurutnya adalah tindakan wajar sebab halaman sekolah termasuk sarana yang harus dijaga dan diperuntukkan untuk keperluan siswa.

⁹⁶ Wawancara dengan Meilani usia 42 tahun di Palangka Raya, 24 Februari 2016.

⁹⁷ Wawancara dengan Rusli usia 33 tahun di Palangka Raya, 25 Februari 2016.

“Menurut saya, hal tersebut wajar saja dilakukan oleh sekolah. karena halaman sekolah memang digunakan untuk kepentingan peserta didik.”⁹⁸

Informan 9: Hanafi (Warga yang melakukan perusakan pagar)

Hanafi menyatakan ketidaksetujuannya jika halaman sekolah tidak lagi boleh digunakan untuk umum. Ia menyatakan keberatan karena remaja-remaja sekitar tidak memiliki lahan untuk bermain dan berkumpul.

“Saya tidak setuju. Kalau halaman sekolah ditutup, lalu anak-anak sekitar sini bermain di mana?”⁹⁹

c. Pemasangan Pembatas Lahan

Lokasi SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya berada di tengah pemukiman padat penduduk. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa perlu dilakukan pemasangan pembatas lahan terhadap batas-batas lahan milik sekolah agar tidak terjadi tumpang tindih lahan dengan warga sekitar yang memicu konflik.

Informan 1: Yanti, S.E. (Masyarakat sekitar)

Yanti menyatakan bahwa melalui pemasangan pembatas lahan milik sekolah, masyarakat menjadi mengetahui batasan lahan milik sekolah sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan yang memicu konflik.

“Bagus juga dengan adanya batasan terhadap lahan yang dimiliki sekolah agar masyarakat mengetahui batasan lahan yang mereka

⁹⁸ Wawancara dengan Badrudin usia 60 tahun di Palangka Raya, 26 Februari 2016.

⁹⁹ Wawancara dengan Hanafi usia 48 tahun di Palangka Raya, 25 Februari 2016.

miliki untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.”¹⁰⁰

Informan 2: Atim (Masyarakat sekitar)

Menurut Atim, kebijakan mengenai pemasangan pembatas lahan memang wajar dilakukan pihak sekolah karena tindakan tersebut adalah hak sekolah.

“Kalau memang kebijakan itu ada ya hak sekolah”¹⁰¹

Informan 3: Halimatus Sa’diyah (Isteri Ketua RW)

Halimatus Sa’diyah juga mengatakan hal yang senada dengan Yanti dan Atim. Kebijakan tersebut adalah hal wajar yang dilakukan pihak sekolah. hal tersebut bertujuan agar batas-batas lahan milik sekolah menjadi jelas.

“Tidak ada masalah. Wajar saja karena supaya jelas.”¹⁰²

Informan 4: Isnaini (Ketua RT)

Menurut Isnaini, kebijakan sekolah mengenai pemasangan pembatas lahan merupakan upaya agar memperjelas batas-batas tanah milik sekolah.

“Setuju-setuju saja biar jelas batas tanah milik sekolah itu sampai mana.”¹⁰³

Informan 5: Kamila (Masyarakat sekitar)

Kamila menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya kebijakan tersebut adalah upaya pihak sekolah mengantisipasi

¹⁰⁰ Wawancara dengan Yanti usia 39 tahun di Palangka Raya, 20 Februari 2016.

¹⁰¹ Wawancara dengan Atim usia 48 tahun di Palangka Raya, 20 Februari 2016.

¹⁰² Wawancara dengan Halimatus Sa’diyah usia 46 tahun di Palangka Raya, 21 Februari 2016.

¹⁰³ Wawancara dengan Isnaini usia 43 tahun di Palangka Raya, 22 Februari 2016.

permasalahan yang dapat terjadi jika batas-batas lahan milik sekolah tidak jelas.

“Bagus dan setuju saja *sih* agar tidak terjadi tumpang tindih lahan antara sekolah dengan masyarakat sini.”¹⁰⁴

Informan 6: Meilani (Masyarakat sekitar)

Meilani menyatakan bahwa jika pihak sekolah tidak memberi batas-batas lahan yang jelas, akan ada kemungkinan warga yang tidak mengetahui kemudian membuat bangunan di atas tanah milik sekolah dengan seenaknya. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut memang perlu dilakukan.

“Bagus dan setuju saja karena kalau tidak diberi batas lahan, siapa tahu ada warga yang tidak mengetahui bahwa lahan tersebut milik sekolah lalu mereka seenaknya mendirikan bangunan.”¹⁰⁵

Informan 7: Rusli (Masyarakat sekitar)

Rusli menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan sekolah mengenai pemasangan pembatas lahan.

“Setuju saja kalau memang lahan tersebut masih termasuk batas milik sekolah.”¹⁰⁶

Informan 8: Badrudin (Ketua RW yang baru)

Ketua RW yang baru juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah. Melalui pembuatan kebijakan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kamalia usia 39 tahun di Palangka Raya, 23 Februari 2016.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Meilani usia 42 tahun di Palangka Raya, 24 Februari 2016.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Rusli usia 33 tahun di Palangka Raya, 25 Februari 2016.

pemasangan pembatas lahan tersebut, pihak sekolah dan masyarakat mengetahui batas lahan masing-masing.

“Saya rasa pihak sekolah memang perlu membuat batas lahan supaya jelas mana lahan milik sekolah mana yang tidak.”¹⁰⁷

3. Resolusi konflik dalam mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya

Beberapa resolusi terhadap konflik-konflik yang terjadi karena penetapan kebijakan-kebijakan oleh pihak sekolah, dikemukakan oleh narasumber dengan tanggapan yang berbeda-beda bergantung pada persepsi masing-masing. Sebagian resolusi yang dikemukakan oleh narasumber pada saat wawancara berlangsung merupakan resolusi yang telah ditempuh oleh pihak sekolah dalam menghadapi konflik yang muncul. Resolusi lainnya merupakan pendapat dari masing-masing narasumber.

Informan 1: Kepala Sekolah

Penulis memilih kepala sekolah sebagai narasumber pertama karena kepala sekolah merupakan pimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepala sekolah harus memiliki sikap yang sigap dan tanggap terhadap berbagai konflik yang muncul, baik yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah. berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, ia menyatakan bahwa dalam penanganan konflik yang terjadi sudah ditempuh beberapa cara.

“... berusaha menjelaskan dan menghubungi pihak RW dan RT dan bahkan kami mendatangkan pihak yayasan untuk menjelaskan dan membawa bukti fisik tentang batas lahan milik yayasan yang telah dihibahkan ke sekolah kepada pihak masyarakat, menjelaskan tujuan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Wahyuni usia 60 tahun di Palangka Raya, 26 Februari 2016.

mengapa akses jalan ditutup untuk umum, dan pelarangan halaman sekolah jadi tempat parkir dan bermain remaja secara umum.”

“....salah satunya dengan mensosialisasikan apa saja kebijakan yang dibuat sekolah kepada pihak terkait baik di sekolah atau pihak masyarakat apabila kebijakan itu berkaitan dengan masyarakat. Menimbang segala akibat negative atau positif yang timbul dari kebijakan tersebut. Terus memantau jalannya kebijakan dan pada waktunya mengevaluasi kebijakan yang dibuat tersebut.”¹⁰⁸

Informan 2: Waka Bidang Sarana dan Prasarana

Aprilia Rahmadiyah selaku waka bidang sarana dan prasarana, menyatakan bahwa pihak sekolah telah menempuh sebuah solusi untuk mengatasi konflik, yakni menggunakan teknik musyawarah. Selain itu, menurutnya sekolah juga melakukan pengelolaan terhadap konflik melalui pendekatan dan pencarian akar masalah.

“Musyawarah yang saya tahu salah satunya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengelola konflik, melakukan pendekatan, mencari akar permasalahan.”¹⁰⁹.

Informan 3: Waka Bidang Kurikulum

Menurut Sri Widayati, Waka Bidang Kurikulum di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, sepengetahuannya, jika terjadi konflik di sekolah, maka solusi yang dilakukan adalah mengadakan rapat. Pada rapat tersebut, akan hadir seluruh anggota dalam struktur organisasi sekolah dan juga melibatkan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Masripanti (Kepala Sekolah) usia 50 tahun di Palangka Raya, 9 Februari 2016.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Aprilia Rahmadiyah S usia 26 tahun di Palangka Raya, 12 Februari 2016.

perwakilan masyarakat jika konflik yang muncul berkaitan dengan masyarakat sekitar.

“Saya kurang tahu, permasalahan secara jelasnya berkaitan dengan hubungan antara sekolah dengan masyarakat (wali murid/lingkungan sekolah) atau intern sekolah. Kalau untuk intern saya kira tidak ada, dan programnya gimana saya kurang tahu, yang saya tahu selama ini jika ada sedikit permasalahan, rapat adalah solusinya dan hasil akhir diambil atas keputusan bersama/bukan sepihak.”¹¹⁰

Informan 4: Waka Bidang Humas

Penulis juga mewawancari waka bidang humas di SMP Islam Nurul Ihsan, Muhammad Syahren. Ia mengungkapkan beberapa solusi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi dan mengatasi jika terjadi sebuah konflik.

“Ada. Yang pertama dibentuknya komite dan menjalin komunikasi dengan baik, yaitu perpanjangan tangan dari kepala sekolah, guru dan orang tua. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang mendasar pihak sekolah bisa memusyawarahkan dengan warga sekolah dan masyarakat serta yayasan yang difasilitasi pihak komite. Yang kedua menyampaikan kebijakan yang dibuat sekolah yang berkaitan dengan masyarakat secara lisan kemudian tertulis dan mengundang mereka rapat.”¹¹¹

Responden 5: Waka Bidang Kesiswaan

Menurut Taufik Adi Sasono, waka bidang kesiswaan di SMP Islam Nurul Ihsan, pihak sekolah telah menempuh berbagai cara atau solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi. Solusi yang semakin ditingkatkan oleh pihak sekolah adalah menjalin komunikasi dengan lebih baik lagi kepada masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Hal ini menurutnya dapat meminimalisir

¹¹⁰ Wawancara dengan Sri Widayati usia 48 tahun di Palangka Raya, 13 Februari 2016.

¹¹¹ Wawancara dengan Muhammad Syahren usia 45 tahun di Palangka Raya, 15 Februari 2016.

munculnya konflik-konflik lain di tengah masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

“Ada. Setahu saya setelah terjadi beberapa masalah kemarin pihak sekolah semakin menjalin komunikasi dengan warga masyarakat dengan baik. Melibatkan masyarakat dalam beberapa kegiatan seperti shalat istisqo, perbaikan jembatan dan beberapa kegiatan lainnya yang diharapkan ada hubungan baik yang dijalin dengan masyarakat sehingga meminimalkan permasalahan yang terjadi.”¹¹²

Informan 6: Guru Mata Pelajaran

Menurut Rina Arif, salah seorang guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, pihak sekolah telah mengusahakan menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat sekitar. Pemberitahuan mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah berkaitan dengan masyarakat sekitar juga telah disampaikan secara lisan maupun tertulis.

“Yang saya tahu pihak sekolah selalu berusaha bekerjasama dengan pihak masyarakat, memberitahu secara lisan juga tertulis. Untuk keterlibatan guru-guru ada yang dilibatkan untuk mencari solusi dalam rapat tapi ada juga yang tidak dilibatkan.”¹¹³

Informan 7: Guru Mata Pelajaran

Tanggapan dari Sri Utami, guru mata pelajaran matematika di SMP Islam Nurul Ihsan, terhadap solusi yang ditempuh pihak sekolah, menurutnya harus lebih disempurnakan atau disesuaikan dengan pola manajemen permasalahan yang tepat.

¹¹² Wawancara dengan Taufik Adji Sasono usia 24 tahun di Palangka Raya, 16 februari 2016.

¹¹³ Wawancara dengan Rina Arif usia 44 tahun di Palangkaraya 17 Februari 2016.

“Menurut saya harus disempurnakan lagi sesuai dengan pola manajemen permasalahan yang tepat, untuk keterlibatan guru juga harusnya semua saja dilibatkan selama ini hanya sebagian saja ketika ada permasalahan yang diajak musyawarah jadi yang lain terkadang kebingungan.”¹¹⁴

Informan 8: Petugas Keamanan/Satpam

Zulkifli, satpam di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya menyatakan bahwa ia kurang mengetahui dengan rinci seperti apa pihak sekolah mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul. Namun, ia menambahkan bahwa tentunya pihak sekolah tidak sembarang mengambil dan menetapkan kebijakan apalagi berkaitan dengan masyarakat sekitar. Tentunya kebijakan tersebut ditetapkan setelah melalui proses musyawarah yang melibatkan pihak terkait.

“Secara rinci saya tidak terlalu mengetahui mengenai penanganan permasalahan yang dihadapi, namun kebijakan yang dibuat sekolah pasti diberitahukan kepada kami warga sekolah, bahkan kami pun diminta memberikan pendapat bahkan membantu mencari solusinya.”¹¹⁵

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah terkait dengan masyarakat sekitar, merupakan kebijakan yang ditetapkan bersama melalui jalan musyawarah dengan pihak terkait. Pihak sekolah merasa perlu mengambil kebijakan tersebut karena didasari pada beberapa laporan baik guru maupun siswa yang merasa terganggu jika pihak sekolah tidak segera mengambil tindakan.

Pihak sekolah pun sebenarnya sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui cara-cara seperti: sosialisasi mengenai kebijakan tersebut, mengundang tokoh masyarakat dan pejabat warga agar dapat bersama memberikan pendapat dan solusinya. Cara-cara yang dilakukan oleh pihak

¹¹⁴ Wawancara dengan Sri Utami usia 44 tahun di Palangkaraya, 18 Februari 2016.

¹¹⁵ Wawancara dengan Zulkifli usia 28 tahun, di Palangkaraya, 11 Februari 2016.

sekolah dalam proses sosialisasi dan penetapan kebijakan tersebut memang memunculkan beberapa konflik untuk sebagian masyarakat yang kontra. Sebab, kebijakan tersebut jelas mengubah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

Sebagian masyarakat lainnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut. Masyarakat ini rata-rata berpendapat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah merupakan suatu hak sekolah dalam proses pembangunan dan pencapaian visi dan misi. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tersebut semata-mata bertujuan untuk menciptakan suasana yang baik di lingkungan belajar SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya.

C. Pembahasan Penelitian

Pembahasan data penelitian bab ini meliputi jenis kebijakan sekolah yang menimbulkan konflik, tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, dan resolusi konflik dalam mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa konflik-konflik yang terjadi di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dapat dikategorikan dalam tiga tahapan, yaitu :

a) Konflik tahap satu

Berdasarkan penelitian di lapangan, konflik tahap satu telah terjadi di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, yakni munculnya perasaan jengkel atau kesal dari beberapa warga masyarakat yang merasa terganggu atas kebijakan

oleh pihak sekolah yang menutup jalan alternatif yang sering digunakan warga masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara bahwa:

“Sebenarnya saya merasa kurang setuju. Dari dulu kan kami sering menggunakan jalan tersebut sebagai jalan alternatif. Tapi setelah jalan ditutup, kami terpaksa harus lewat jalan yang agak jauh.”¹¹⁶

Konflik awal yang terjadi di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dikategorikan pada tahap satu sesuai dengan teori yang dikemukakan William bahwa:

“Konflik tahap satu adalah konflik yang terjadi secara berulang setiap hari dengan pemicu yang sama, konflik ini merupakan konflik kecil yang apabila dibiarkan akan menjadi besar.”¹¹⁷

b) Konflik tahap dua

Setelah dikategori pada tahap satu dan tidak adanya penanganan langsung dari pihak terkait, konflik ini terus meningkat ke arah yang cukup besar. Konflik pada tahap dua merupakan perwujudan dari perasaan-perasaan jengkel atau kesal menjadi bentuk-bentuk perlawanan secara lisan.¹¹⁸ Berdasarkan penelitian di lapangan, konflik di SMP Islam telah mencapai pada tahap dua ketika terjadi pembicaraan-pembicaraan perlawanan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan sekolah. Hal ini ditunjukkan dalam hasil wawancara, yaitu:

“Saya tidak setuju jika akses jalan ditutup. Kami *kan* sudah terbiasa menggunakan jalan di situ. Jarak antara rumah kami dan jalan raya

¹¹⁶ Wawancara dengan Rusli usia 33 tahun di Palangka Raya, 25 Februari 2016.

¹¹⁷ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 7

¹¹⁸ *Opcit*, h. 7

jadi tidak terlalu jauh. Kalau akses jalan ditutup, kami harus berputar melewati jalan yang cukup jauh.”¹¹⁹

c) Konflik tahap tiga

Konflik pada tahapan ini termasuk konflik terparah. Jika suatu lembaga telah mencapai tahapan ini, maka salah satu atau semua pihak yang berkonflik memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal negatif seperti merusak dan mencederai pihak lain.¹²⁰ Berdasarkan penelitian di lapangan, di SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya telah mencapai konflik tahap tiga ketika terjadi pengrusakan fasilitas sekolah dan pengrusakan tanaman-tanaman milik sekolah sebagai bentuk perlawanan pihak yang kontra terhadap kebijakan sekolah. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara, yaitu:

“Saya sangat tidak setuju kalau jalan ditutup. Karena jalan itu kan sudah lama digunakan oleh warga. Warga sudah terbiasa. Saya rasa warga juga punya hak menggunakan jalan itu.”¹²¹

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi berawal dari konflik ringan berkenaan dengan kebijakan yang dibuat sekolah, namun ketika konflik tersebut mulai muncul namun tidak dilakukan penanganan secara langsung maka pada akhirnya berubah menjadi konflik besar yang memunculkan reaksi keras bahkan berujung pada perusakan dan tindakan-tindakan yang merugikan di salah satu pihak.

¹¹⁹ Wawancara dengan Meilani 42 tahun di Palangkaraya, 24 Februari 2016.

¹²⁰ William Hendricks, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 7

¹²¹ Wawancara dengan Hanafi usia 48 tahun di Palangka Raya, 25 Februari 2016.

Pembahasan dalam bab ini diuraikan menjadi 3 (tiga) tema analisis hasil penelitian lapangan yang dipaparkan secara berturut-turut:

1) Jenis Kebijakan Sekolah yang Menimbulkan Konflik

Pihak SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, merasa perlu menetapkan beberapa kebijakan berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan tersebut jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan memicu hal-hal negatif yang berimbas langsung kepada warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru dan peserta didik serta kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah memang berimbas secara langsung kepada masyarakat sekitar, karena kebijakan tersebut terkait dengan masyarakat. Sehingga, setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar, sempat muncul beberapa konflik sebagai wujud protes dari masyarakat yang menentang kebijakan tersebut. Berikut dipaparkan tiga kebijakan sekolah yang memicu konflik di masyarakat sekitar sekolah.

a) Penutupan Akses Jalan Alternatif

Kebijakan mengenai penutupan akses jalan alternatif untuk umum yang melalui lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, diambil berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

1. Akses jalan alternatif tersebut berada di lingkungan sekolah, sehingga apabila tidak dilakukan penutupan untuk umum, proses belajar mengajar akan terganggu karena banyak orang yang bebas keluar masuk. Kedatangan orang tua peserta didik atau tamu sekolah pun dapat terpantau

dengan baik apabila dilakukan penutupan terhadap akses jalan alternatif tersebut.

2. Apabila akses jalan tidak ditutup, maka akan mudah terjadi perkelahian yang melibatkan peserta didik SMP Islam Nurul Ihsan karena siapa saja dengan mudahnya diperbolehkan keluar masuk di lingkungan sekolah.
3. Apabila akses jalan tidak ditutup, maka ada kemungkinan peserta didik dengan seenaknya pulang terlebih dahulu sebelum jam pelajaran berakhir karena pihak sekolah tidak mungkin melakukan penjagaan yang ketat setiap hari di jalan yang biasa digunakan masyarakat umum.
4. Selama ini, akses jalan tersebut digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Warga yang bermukim di sekitar lingkungan sekolah mengatakan bahwa penutupan akses jalan untuk umum perlu dilakukan agar tidak ada orang asing yang bebas keluar masuk bahkan pada malam hari yang membuat warga sekitar menjadi resah.¹²²
5. Akses jalan yang ditutup masih termasuk lahan milik sekolah, hingga dirasa wajar jika sekolah tidak mengizinkan akses jalan tersebut digunakan untuk umum.
6. Penutupan akses jalan alternatif untuk umum ini dilakukan oleh pihak sekolah untuk menunjang terciptanya suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, pihak sekolah merasa bahwa kebijakan penutupan akses jalan untuk umum merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah untuk menjaga keamanan,

¹²² Lihat catatan wawancara dengan Meilani di bab IV.

ketertiban dan kenyamanan peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.

Tindakan pihak sekolah berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan sekolah, senada dengan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson (1979):

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive course of problem or matter of concern*)¹²³

Berdasarkan teori kebijakan di atas artinya bahwa kebijakan yang dibuat oleh pimpinan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, merupakan jalan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan sekolah terutama berkaitan dengan akses jalan sekolah yang digunakan secara umum oleh masyarakat. Hal ini juga disetujui oleh beberapa informan dalam hasil wawancaranya, yaitu:

“Menurut saya, memang wajar-wajar saja karena itu tanah sekolah dan hak sekolah menutupnya, karena dikhawatirkan apabila dilalui atau dibiarkan menjadi jalan bebas maka akan masuk dan lewat para pemuda yang diluar sekolah maka dengan mudahnya menawarkan barang-barang haram yang tidak diinginkan, selain itu hak sekolah dengan tujuan untuk membatasi agar anak-anak tidak keluar dan tidak dapat melakukan pertemuan dengan anak-anak lain yang diluar dari sekolah SMP Islam Nurul Ihsan, dan juga dapat mengontrol anak-anak ketika istirahat dan begitu juga ketika malam hari lingkungan sekolah bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan lain-lainnya.¹²⁴

¹²³ <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> diakses pada hari senin, 3 Oktober 2016, pukul 08.45 WIB.

¹²⁴ Wawancara dengan Muhammad Syahren usia 45 tahun di Palangka Raya, 15 Februari 2016.

Hal ini juga disetujui oleh Yanti, S.E, bahwa:

“Tanggapannya baik dengan menutup jalan yang biasa digunakan untuk masyarakat, karena jalan yang biasa digunakan masyarakat merupakan fasilitas sekolah dan untuk mencegah hal-hal yang

tidak diinginkan jika jalan itu masih digunakan secara umum.

”¹²⁵
....

Kebijakan penutupan akses jalan oleh pihak sekolah, tidak serta-merta diterima oleh masyarakat. Sebagian masyarakat menunjukkan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. Penolakan tersebut bahkan sampai disertai dengan tindakan-tindakan negatif, seperti pengrusakan fasilitas-fasilitas milik sekolah. Hal tersebut terungkap pada wawancara berikut.

“ ...

Adanya kerusakan fasilitas pagar sekolah, fasilitas olah raga, dirusaknya tanaman yang ada di halaman sekolah sehingga sekolah melakukan perbaikan yang tentu saja mengeluarkan biaya operasional tambahan.”¹²⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menilai bahwa terdapat pro dan kontra di masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pendapat-pendapat kontra tersebut muncul sebagai reaksi karena terdapat perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar sebagai imbas kebijakan tersebut. Seyogyanya, pihak sekolah terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif untuk meminimalisir reaksi kontra yang akan terjadi.

Pendekatan persuasif dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

¹²⁵ Wawancara dengan Yanti usia 39 tahundi Palangkaraya, 20 Februari 2016.

¹²⁶ Wawancara dengan Zulkifli usia 28 tahun di Palangkaraya, 11 Februari 2016.

- 4) Pihak sekolah mencari akar permasalahan/konflik yang terjadi.
- 5) Pihak sekolah berupaya bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.
- 6) Pihak sekolah dan pihak masyarakat yang terlibat konflik melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar.¹²⁷

Berdasarkan langkah-langkah pendekatan persuasif tersebut, pihak sekolah seharusnya terlebih dahulu mencari asal permasalahan agar mudah mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak terkait. Konflik muncul dikarenakan adanya dua tujuan yang berbeda antara pihak sekolah dan masyarakat, sesuai dengan ciri-ciri konflik berikut:

Timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.¹²⁸

Pengambilan kebijakan oleh pihak sekolah, sebenarnya tidak akan mengundang reaksi kontra berlebihan jika sebelumnya pihak sekolah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Saling tukar pendapat dapat dilakukan agar menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan yang muncul.

b) Pelarangan Penggunaan Sarana Milik Sekolah oleh Masyarakat Sekitar

Kebijakan kedua yang ditetapkan oleh pihak sekolah adalah pelarangan penggunaan sarana milik sekolah oleh masyarakat sekitar. Sarana milik SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya yang sering digunakan oleh

¹²⁷ Lihat wawancara dengan Masripani di Palangka Raya, 9 Februari 2016. .

¹²⁸ http://jurnal.sdm.blogspot.com/2014/04/manajemenkonflik_definisi-ciri-sumber.html

diunduh pada 16 September 2015. Pukul 1.02 WIB.

masyarakat sekitar adalah lapangan olah raga dan halaman. Lapangan olah raga dan halaman sekolah berada persis di pinggir jalan raya. lapangan olah raga sering digunakan oleh remaja sekitar untuk bermain bola dan *nongkrong* pada sore hari. Sedangkan halaman sekolah sering dijadikan masyarakat sekitar sebagai area parkir karena letaknya yang berada di pinggir jalan raya.

Lapangan dan halaman sekolah ini memang berada di depan kantor Agra Budi, sebelum lokasi ini dijadikan lokasi pendidikan masyarakat dan remaja sekitar bebas menggunakan halaman dan lapangan karena memang tidak ada penjaga yang diberi tugas untuk mengawasi. Pihak kantor pun merasa tidak terlalu terganggu karena penggunaan fasilitas ini biasa terjadi sore hingga malam hari pada saat jam kantor sudah selesai.

Setelah SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya mulai berdiri dan aktif melakukan kegiatan belajar mengajar di lokasi ini, fasilitas tersebut masih saja digunakan oleh masyarakat umum. Padahal, kegiatan pembelajaran bagi peserta tidak hanya terfokus pada pembelajaran di kelas selama pagi hari. Peserta didik memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada sore hari. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan agar kecerdasan peserta didik tidak hanya terlatih secara kognitif saja, tetapi juga secara psikomotorik. Hal ini senada dengan pendapat berikut.

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan berkala atau hanya dalam waktu-waktu tertentu dan ikut dinilai.¹²⁹

¹²⁹ Yudha M. Saputra. *Pengembangan Kegiatan KoEkstrakurikuler*. Jakarta: Depdikbud, 1998, h.6.

Seiring aktifnya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, maka fasilitas sekolah juga harus menunjang. Ketersediaan lapangan sebagai wadah kegiatan pembelajaran di luar kelas, berarti harus dikondisikan sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh peserta didik. Namun, pada kenyataannya, kegiatan peserta didik di luar kelas sering mengalami kendala sehingga pihak sekolah merasa perlu membuat sebuah kebijakan agar para peserta didik tidak merasa dirugikan dan kegiatan belajar mengajar dapat belajar dengan lancar.

Hal-hal berikut yang menjadi alasan kuat yang mendasari kebijakan pelarangan penggunaan fasilitas milik sekolah untuk masyarakat sekitar:

1. Remaja sekitar yang berolah raga dan *nongkrong* di lapangan sekolah pada sore hingga malam hari, tidak memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Mereka seenaknya membuang sampah di pinggir atau bahkan di tengah lapangan olah raga sehingga ketika siswa ingin menggunakan lapangan tersebut, siswa perlu membersihkannya terlebih dahulu.
2. Kebiasaan remaja sekitar yang *nongkrong* hingga malam hari di lapangan olah raga milik sekolah, dikhawatirkan akan memicu keributan antar sesama teman atau masyarakat lain.
3. Para peserta didik SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada sore hari. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut hampir semuanya menggunakan lapangan sebagai tempat berlatih, sehingga kadang muncul gangguan-gangguan dari remaja sekitar yang juga menggunakan lapangan olah raga tersebut.

4. Kegiatan rutin peserta didik pada pagi hari seperti upacara bendera hari senin dan senam pagi sering tertunda pelaksanaannya karena lapangan perlu dibersihkan terlebih dahulu.
5. Halaman sekolah sering dijadikan area parkir oleh masyarakat sekitar, sehingga ketika akan dilaksanakan senam pagi, peserta didik berhimpitan di antara kendaraan milik warga yang diparkir sembarangan.
6. Kebiasaan warga menjadikan halaman sekolah sebagai area parkir ini dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan atau pencurian kendaraan. Kendaraan milik masyarakat yang terparkir di halaman sekolah bercampur dengan kendaraan milik guru dan sepeda milik peserta didik, sehingga pihak sekolah kesulitan untuk melakukan pengamanan terhadap kendaraan milik guru dan peserta didik.
7. Pihak sekolah tidak ingin terlibat apalagi bertanggung jawab jika terjadi kehilangan/pencurian sepeda motor milik masyarakat yang di parkir di halaman sekolah. Karena, pihak sekolah tidak pernah mengizinkan halaman sekolah dijadikan area parkir oleh masyarakat umum.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kebijakan tentang pelarangan penggunaan fasilitas sekolah oleh masyarakat umum, dirasa perlu ditetapkan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah tidak ingin jika kegiatan rutin peserta didik seperti upacara bendera, senam pagi dan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar mengajar khususnya mata pelajaran olah raga menjadi terganggu jika lapangan dan halaman sekolah dipergunakan dengan bebas dan tidak bertanggung jawab oleh masyarakat umum. Hal ini dikarenakan pihak

sekolah ingin menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sesuai dengan pendapat berikut:

Salah satu aspek penting keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh pembelajar/guru adalah penciptaan kondisi pembelajaran yang efektif. Kondisi pembelajaran efektif adalah kondisi yang benar-benar kondusif, kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran.¹³⁰

c) Pembatasan Lahan Milik Sekolah

SMP Islam Nurul Ihsan berdiri di atas tanah seluas 13.443 m². Lahan ini merupakan hibah dari H. Sahrani Budi. Sebagian bangunan SMP Islam Nurul Ihsan, masih menggunakan bangunan TK/TPA dan TQA Nurul Ihsan Palangkaraya yang berkegiatan pada sore hari setelah jam pelajaran SMP selesai. Sebagian ruangan lainnya merupakan bangunan baru yang dibangun khusus untuk SMP. Terdapat empat ruang kelas yang baru dan satu ruang untuk dewan guru yang merupakan bangunan baru.

Sebagai salah satu persyaratan pendirian lembaga pendidikan SMP, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah berikut:

“Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah

¹³⁰ <http://teoribagus.com/lingkungan-pembelajaran-yang-kondusif> diunduh pada hari Selasa, 4 Oktober 2016, Pukul 12.17 WIB.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara”¹³¹

Berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam Permendikbud di atas, dan kondisi bahwa SMP Islam Nurul Ihsan berada di lingkungan yang padat penduduk. Bahkan beberapa bangunan rumah warga berdiri dengan jarak yang cukup dekat dengan bangunan milik SMP Islam Nurul Ihsan. Maka, pihak sekolah, menetapkan kebijakan dengan pertimbangan bahwa:

1. SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya sedang berada dalam tahap pembangunan. Sekolah ini tidak ingin terjadi tumpang tindih lahan pada saat pembangunan berlangsung. Jika batas-batas lahan milik SMP Islam Nurul Ihsan sudah jelas, maka proses pembangunan dapat berlangsung dengan lancar tanpa perlu mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih lahan dengan masyarakat sekitar.
2. Kejelasan kepemilikan lahan milik sekolah swasta, termasuk SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya harus jelas. Hal ini perlu dilakukan mengingat sekolah-sekolah swasta di Palangkaraya, sebagian besar status lahannya berupa hibah. Meskipun lahan tersebut berupa hibah, lahan harus segera dialihkan kepemilikannya atas nama sekolah dan disahkan ke notaris. Hal ini sebagai tindakan antisipasi jika suatu saat ada orang yang berniat mengambil hak kepemilikan tanah.¹³²

¹³¹ <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/07/pedoman-pendirian-sd-smp-sma-dan-smk.html>. diunduh pada hari Rabu, 5 Oktober 2016, Pukul 15.17 WIB.

¹³² Lihat wawancara dengan Bhinarso di Palangkaraya, 18 April 2016.

3. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa bangunan rumah milik warga sekitar yang berdiri di atas lahan milik sekolah. Jika tidak dilakukan pembatasan lahan milik sekolah, tidak dapat dipungkiri akan semakin banyak warga sekitar yang membangun rumah tanpa mengetahui bahwa lahan yang digunakan adalah lahan milik sekolah.
4. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa warga yang menyalahgunakan bangunan milik sekolah dengan seenaknya. Rumah-rumah warga yang sangat dekat dengan bangunan sekolah menjadi salah satu penyebabnya. Di bagian belakang dinding-dinding ruang kelas, digunakan sebagai tempat menggantung benda-benda milik warga.
5. Kejelasan mengenai batas-batas lahan milik sekolah perlu dilakukan untuk mempermudah kepengurusan pajak.

Kebijakan-kebijakan tersebut diambil tidak secara sepihak oleh pihak sekolah saja. Pihak sekolah menyadari, bahwa kebijakan tersebut terkait dengan masyarakat sekitar. Sehingga, jika ingin mengambil sebuah keputusannya, tentunya melibatkan seluruh pihak. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara berikut:

“Ada, Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang perangkat RW, RT dan tokoh masyarakat. Memberikan surat pemberitahuan secara resmi kepada pihak ketua RW, RT yang dilanjutkan kepada masyarakat, sesuai dengan hasil keputusan rapat”¹³³

¹³³ Wawancara dengan Masripani usia 50 tahun di Palangkaraya 9 Februari 2016.

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pihak sekolah telah mencoba menenggakkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mengundang perwakilan masyarakat, yakni para tokoh masyarakat dan pejabat masyarakat. Tindakan musyawarah yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengambil sebuah kebijakan ini, senada dengan firman Allah SWT dalam QS Ali Imran: 159¹³⁴

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
اللَّهُ يُحِبُّ . عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
الْمُتَوَكِّلِينَ .

Artinya “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimim jika menghadapi suatu masalah yang dapat memicu konflik, sikap yang harus tetap ditunjukkan adalah berlaku lemah lembut. Ayat ini menjadi salah satu pedoman untuk menjalankan musyawarah. Apabila suatu konflik muncul, maka kedua belah pihak hendaknya dapat bersikap dengan kepala dingin tanpa terbawa emosi. Kedua belah pihak dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah melalui musyawarah, duduk bersama mencari jalan keluar. Apabila kedua belah pihak mementingkan amarahnya, maka seperti yang tertulis dalam ayat tersebut,

¹³⁴Ali Imran [3]:159.

bahwa masing-masing pihak malah akan semakin menjauh dan masalah menjadi tidak terselesaikan.

Musyawarah yang dilakukan oleh pihak SMP Islam Nurul Ihsan dengan pihak masyarakat sekitar, merupakan salah satu langkah awal penetapan kebijakan agar meminimalisir konflik yang muncul. Pihak sekolah juga menyadari bahwa keputusan tidak dapat diambil secara sepihak. Sebab, kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah merupakan sebuah tindakan yang mengubah kebiasaan lama masyarakat sekitar, seperti penggunaan jalan alternatif yang biasa digunakan masyarakat, penggunaan fasilitas milik sekolah oleh masyarakat dan penggunaan lahan milik sekolah oleh masyarakat.

2) Tanggapan Masyarakat terhadap Kebijakan Pimpinan Sekolah dalam Mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya

Masyarakat sekitar merupakan sasaran utama dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Masyarakat sekitar pada dasarnya memiliki peran dalam sebuah lembaga pendidikan. Peran serta masyarakat pada lembaga pendidikan diantaranya dengan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga. Hal ini senada dengan pendapat berikut:

“Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sarana dan prasaranan pendidikan dengan menyumbangkan dana, barang atau tenaga.”¹³⁵

¹³⁵ Erie Siti Syarah dalam <https://paudfip.wordpress.com/2009/06/17/peranan-keluargasekolah-dan-masyarakat-dalam-pendidikan-anak/> diunduh pada hari Rabu, 5 Oktober 2016. Pukul 20.15 WIB.

Berdasarkan pendapat di atas, maka ketika masyarakat diikutsertakan dalam penetapan kebijakan oleh pihak sekolah, seyogyanya masyarakat mau menjalin komunikasi yang baik salah satunya dengan kehadiran dan sumbangan pikiran pada saat diundang menghadiri rapat oleh pihak sekolah.

Rapat yang diadakan pihak sekolah untuk membahas dan mempertimbangkan kebijakan yang akan ditetapkan dan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Banyaknya kehadiran peserta rapat, terutama dari masyarakat sekitar turut memengaruhi penetapan kebijakan yang pada akhirnya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, memicu beragam reaksi. Beberapa masyarakat dengan tegas mendukung kebijakan tersebut, sebagian lainnya merasa keberatan bahkan sempat melakukan pengrusakan sebagai bentuk protes. Berikut akan dipaparkan tanggapan masyarakat yang pro dan kontra dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah:

a) Tanggapan Masyarakat yang Mendukung terhadap Kebijakan Sekolah

Masyarakat yang mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah menyadari dengan baik bahwa kebijakan tersebut ditetapkan bukan untuk kepentingan salah satu pihak saja, yakni pihak sekolah. Masyarakat yang mendukung kebijakan ini memahami bahwa dalam proses mengembangkan sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah, pihak sekolah perlu melakukan upaya-upaya yang mendukung agar suasana belajar kondusif tercipta di lingkungan tersebut.

Masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut merasa bahwa pihak sekolah memang perlu membuat kebijakan tersebut karena beberapa pertimbangan berikut.

a. Sekolah memiliki hak

Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan akses jalan, fasilitas dan lahan milik sekolah. Ketiga kebijakan tersebut, menurut masyarakat sekitar adalah kebijakan yang layak ditetapkan karena sekolah memiliki hak terhadap tiga hal tersebut. Misalnya, akses jalan tersebut masih terhitung berada di lahan milik sekolah. Jadi, masyarakat merasa bahwa jika pihak sekolah menutup akses jalan tersebut untuk umum, maka hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Terlebih lagi dikarenakan akses jalan alternatif tersebut langsung melalui lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya. Jika akses jalan tersebut tidak ditutup, maka banyak orang dengan mudah keluar masuk saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.

Kebijakan lain berhubungan dengan fasilitas sekolah yang biasa digunakan masyarakat sekitar dengan bebas adalah lapangan dan halaman sekolah. Masyarakat yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa lapangan dan halaman sekolah tersebut termasuk salah satu sarana yang dimiliki oleh sekolah. Sehingga sudah sepantasnya jika sarana milik sekolah hanya diperuntukkan bagi kegiatan sekolah dan kepetingan peserta didik di sekolah tersebut. Persetujuan masyarakat terhadap kebijakan sekolah mengenai penutupan sarana untuk umum tersebut, senada dengan pendapat berikut:

“Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan dengan baik.”¹³⁶

Sesuai dengan pendapat di atas, sudah selayaknya pihak sekolah melakukan pengelolaan yang tepat terhadap sarana dan prasarananya. Karena, pengelolaan yang tepat terhadap sarana dan prasarana sekolah akan menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

- b. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah tersebut tentunya memiliki tujuan yang positif. Sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah merupakan tempat menimba ilmu bagi generasi penerus. Jika mengingat tugas sekolah sebagai pengantar generasi penerus menuju kesuksesan, pihak sekolah harus memiliki sikap bertanggung jawab yang baik.

Tanggung jawab dari pihak sekolah tidak hanya berhubungan dengan pemberian ilmu pengetahuan saja, tetapi juga tanggung jawab lain terhadap karakter anak. Kebijakan yang ditetapkan tentu mempertimbangkan hal-hal yang demikian. Misalnya, jika akses jalan untuk umum tidak ditutup, peserta didik yang suka membolos akan dengan mudah keluar dari kelas karena kurangnya pengawasan dari guru. Jika akses jalan tidak ditutup, orang asing yang berniat membuat keributan

¹³⁶ <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/11/15/pengelolaan-sarana-dan-prasarana-pendidikan/> diunduh pada hari Rabu, 5 Oktober 2016. Pukul 20.35 WIB.

dengan peserta didik di sekolah tersebut juga dengan mudah masuk ke lingkungan sekolah.

Kebijakan mengenai larangan penggunaan fasilitas sekolah untuk umum pun memberi satu pelajaran kepada peserta didik bahwa fasilitas yang dimiliki sekolah adalah milik para peserta didik juga selama mereka bersekolah di sekolah tersebut. Sudah selayaknya jika seseorang memiliki barang, harus dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin. Kebijakan ini mengajari peserta didik untuk belajar bertanggung jawab menjaga dan merawat fasilitas apa pun yang dimiliki oleh sekolah.

Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak SMP Islam Nurul Ihsan ini adalah kebijakan-kebijakan yang positif, yang menjauhkan hal-hal tidak diinginkan terjadi di lingkungan mereka. Misalnya saja jika akses jalan tidak ditutup, pada saat kegiatan belajar mengajar banyak orang asing yang lalu-lalang seenaknya dan mengganggu bahkan tidak menutup kemungkinan memicu permasalahan. Masyarakat sekitar juga mengatakan bahwa penutupan akses jalan alternatif untuk umum ini tidak hanya membuat lingkungan sekolah menjadi tertib, aman dan nyaman saja, tetapi lingkungan sekitar juga merasa demikian. Karena, sebelum akses jalan tersebut ditutup, pada malam hari masih saja banyak orang asing yang menggunakan jalan alternatif tersebut sehingga masyarakat sekitar menjadi was-was dan perlu melakukan penjagaan.

Kebijakan selanjutnya yakni pelarangan penggunaan fasilitas milik sekolah untuk masyarakat umum dan pembatasan lahan milik SMP Islam Nurul Ihsan. Selama ini, pada saat kebijakan tersebut belum diberlakukan,

banyak remaja-remaja yang menggunakan lapangan olah raga pada sore hari secara tidak bertanggung jawab. Remaja-remaja ini tidak memiliki rasa cinta lingkungan sehingga dengan seenaknya mereka membuang sampah di pinggir atau di tengah lapangan. Lapangan juga dijadikan tempat *nongkrong* remaja pada malam hari sehingga masyarakat sekitar merasa khawatir jika dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan akan terjadi keributan, bahkan terjadi transaksi obat-obat terlarang.

Penggunaan halaman sekolah oleh masyarakat umum juga sempat dikhawatirkan dapat memicu permasalahan. Karena, kendaraan-kendaraan tersebut diparkir seenaknya tanpa ada penjagaan khusus. Dikhawatirkan dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir di halaman sekolah tanpa ada penjagaan, dapat memicu niat jahat dan terjadi pencurian kendaraan.

Masyarakat menganggap bahwa pihak sekolah memang perlu melakukan pembatasan terhadap lahan milik sekolah. Karena jika tidak diberi batasan-batasan yang jelas, mungkin ada warga yang tidak tahu bahwa lahan tersebut masuk ke batas milik sekolah dan mereka mendirikan bangunan seenaknya sehingga menimbulkan konflik antara pihak sekolah dan warga tersebut. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang warga:

“Bagus dan setuju saja *sih* agar tidak terjadi tumpang tindih lahan antara sekolah dengan masyarakat sini.”¹³⁷

¹³⁷ Wawancara dengan Kamalia, usia 39 tahun di Palangkaraya, Selasa 23 Februari 2016.

Masyarakat yang mendukung kebijakan ini sebagian besar beranggapan bahwa pihak sekolah berhak melakukan upaya yang dapat menunjang keberhasilan sekolah. Masyarakat sekitar siap mendukung kebijakan tersebut asal pihak sekolah tidak membuat kebijakan yang dianggap merugikan bagi mereka.

b) Tanggapan Masyarakat yang Tidak Mendukung Kebijakan Sekolah

Ketika sebuah kebijakan yang berkaitan antara dua pihak ditetapkan, tentu ada pihak atau sebagian dari dua pihak tersebut merasa keberatan. Seperti itu juga dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah tersebut memberatkan mereka.

Penolakan sebagian masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pihak sekolah ini melalui bermacam cara. Penolakan ditunjukkan oleh masyarakat melalui cara-cara yang sopan bahkan sampai cara-cara yang kurang sopan, seperti pengrusakan terhadap fasilitas milik sekolah seperti yang terlihat dari kutipan wawancara dengan Kepala SMP Nurul Ihsan Palangkaraya berikut:

“... Beragam tanggapannya ada yang menerima dan ada juga yang menolak, yang menolak ada yang bertanya baik-baik, namun ada juga yang menolak dengan melakukan protes keras dan melakukan pengrusakan, seperti halnya yang terjadi pada tahun 2012, terjadi pengrusakan pagar sekolah oleh warga yang menolak, ketika dilarang menggunakan lapangan untuk bermain malahan fasilitas olah raga yang dimiliki sekolah dirusak”¹³⁸

¹³⁸ Lihat wawancara dengan Masripani (Kepala Sekolah) di Palangkaraya, 9 Februari 2016.

Salah satu bentuk reaksi dari warga yang menolak kebijakan tersebut melalui pengrusakan fasilitas sekolah yang pernah terjadi di tahun 2012. Demi mendukung kebijakan mengenai larangan penggunaan fasilitas milik sekolah untuk masyarakat umum, maka pihak sekolah memutuskan untuk mengunci pagar sekolah pada saat jam pelajaran telah berakhir sehingga tidak ada lagi remaja-remaja dan masyarakat sekitar yang bebas menggunakan lapangan dan halaman sekolah.

Penguncian pagar setelah jam pelajaran berakhir juga dilakukan oleh pihak untuk mendukung kebijakan mengenai penutupan akses jalan untuk umum. Sehingga tidak ada lagi warga yang bisa menggunakan akses jalan alternatif yang melalui lingkungan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dengan seandainya lagi. Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini mendapat perlawanan dari warga yang menolak kebijakan tersebut. Warga tersebut kemudian melakukan pengrusakan terhadap pagar sekolah.

Selain protes yang bersifat pengrusakan secara fisik, warga yang menolak kebijakan tersebut juga melakukan ancaman dan teguran secara kasar kepada pihak sekolah seperti guru dan petugas keamanan sekolah. Hal ini diketahui dari kutipan wawancara dengan petugas keamanan sekolah berikut ini.

....ada beberapa guru yang merasa ketakutan karena langsung berhadapan pada saat reaksi warga yang menentang datang, kemudian diancam dan ditegurnya satpam sekolah dengan cara yang kasar. Adanya kerusakan fasilitas pagar sekolah, fasilitas olah raga, dirusaknya tanaman yang ada di halaman sekolah sehingga sekolah melakukan perbaikan yang tentu saja mengeluarkan biaya operasional tambahan.¹³⁹

¹³⁹ Wawancara dengan Zulkifli usia 28 tahun di Palangkaraya, Kamis, 11 Februari 2016.

Berdasarkan kutipan wawancara berikut, dapat diketahui bahwa warga yang menolak kebijakan tersebut tidak hanya melakukan pengrusakan secara fisik pada sarana milik sekolah seperti pagar sekolah bahkan tanaman milik sekolah yang menyebabkan pihak sekolah harus mengeluarkan anggaran baru, tetapi bentuk protes juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak sopan lainnya seperti datang ke sekolah dan berbicara dengan kasar, bahkan melakukan ancaman terhadap petugas keamanan sekolah.

Warga yang menolak menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan sepihak yang tidak menguntungkan bagi mereka. Misalnya saja untuk kebijakan penutupan akses jalan alternatif yang melalui lingkungan sekolah. Akses jalan alternatif ini biasa digunakan warga sebelum SMP Islam Nurul Ihsan ini didirikan dan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga warga merasa kebijakan ini menyulitkan mereka karena harus berputar arah dengan jarak tempuh yang agak jauh.

Kebijakan lain yang dirasa merugikan adalah pelarangan penggunaan fasilitas sekolah seperti lapangan dan halaman untuk masyarakat sekitar. Para remaja sekitar yang biasa bermain, olah raga dan *nongkrong* di lapangan tersebut menjadi kehilangan tempat. Masyarakat yang biasa memarkir kendaraan di halaman sekolah juga merasa dirugikan karena mereka harus memarkir kendaraan mereka sembarangan di pinggir jalan saja.

Beragam tanggapan masyarakat yang muncul setelah kebijakan tersebut ditetapkan oleh pihak sekolah merupakan respon yang harus diapresiasi oleh pihak sekolah. Tanggapan masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan yang tinggi dari masyarakat

sekitar terhadap berdirinya SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya di lingkungan mereka. Sedangkan tanggapan atau respon dari masyarakat yang menolak kebijakan tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman dan kurangnya pengertian serta kesadaran terhadap pentingnya upaya pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

3) Resolusi Konflik dalam Mengelola SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan Lingkungannya

Ketegangan-ketegangan yang muncul dari masyarakat yang tidak mendukung kebijakan tersebut terus diupayakan oleh pihak sekolah agar mereda. Pihak sekolah mencoba berbagai cara untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi sebagai imbas dari diberlakukannya kebijakan atau keputusan tersebut. Pada proses pengambilan kebijakan atau keputusan, pihak SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya mencoba menyelaraskan diri dengan ciri-ciri keputusan yang baik sebagai berikut.

1. Setiap keputusan sekolah yang diambil harus dikomunikasikan dengan jelas kepada orang-orang yang terkena keputusan.
2. Kepala sekolah, staf dan personil lainnya berpartisipasi penuh di dalam proses pembuatan keputusan sekolah.
3. Keputusan sekolah yang dibuat tidak kaku, harus rasional dan mudah diimplementasikan.
4. Keputusan yang diambil harus diikuti dengan implementasinya.
5. Keputusan sekolah yang telah diambil dan dirasakan tidak cocok lagi, tidak dipaksakan untuk dilaksanakan, tetapi harus dibuat keputusan pengganti.¹⁴⁰

Pihak sekolah telah mencoba melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Komunikasi tersebut dilakukan melalui pemberitahuan terhadap tokoh masyarakat dan

¹⁴⁰ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.234

pejabat warga agar dapat hadir dalam rapat yang membahas kebijakan tersebut. Kepala sekolah sebagai pimpinan tidak merancang kebijakan sendiri, melainkan seluruh staf dan guru serta petugas keamanan pun dilibatkan untuk bersama merancang kebijakan tersebut.

Setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan disosialisasikan dengan masyarakat sekitar, pihak sekolah melakukan bukti nyata pengimplementasian kebijakan tersebut. Spanduk-spanduk dibuat sebagai salah satu bentuk pemberitahuan non lisan kepada masyarakat mengenai isi kebijakan-kebijakan tersebut.

Ketetapan kebijakan tersebut, bagi sebagian warga memicu konflik. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut berpengaruh pada aktifitas beberapa warga dan terkesan hanya menguntungkan pihak sekolah saja. Konflik-konflik tersebut tentu tidak bisa dihindari oleh pihak sekolah. Pengelolaan konflik yang dilakukan pihak SMP Islam Nurul Ihsan melalui beberapa upaya berikut:

1. Musyawarah

Pimpinan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya lebih memilih gaya kolaborasi atau pemecahan masalah. Sebagai ciri khasnya dalam menyelesaikan konflik. Gaya kepemimpinan kolaborasi ini selalu berupaya menyelesaikan konflik dengan jalan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait. Tradisi bermusyawarah ini merupakan upaya yang paling

sering dilakukan oleh pihak SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya saat terjadi sebuah konflik.¹⁴¹

Musyawarah merupakan cara penyelesaian konflik dengan adil, karena melibatkan pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan musyawarah tentunya tidak hanya sekadar duduk bersama dan memberikan pendapatnya. Terdapat etika atau adab dalam bermusyawarah yang sangat penting agar pada prosesnya tidak menimbulkan konflik baru, yakni adab berbicara. Pada pelaksanaannya, setiap pihak yang hadir dalam musyawarah berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Setiap orang yang hadir dalam musayawarh, wajib menghargai lawan bicara dan pendapat yang diberikan. Adab berbicara pada saat bermusyawarah ini terdapat pada QS An-Nahl:125¹⁴²

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْثَدِينَ (١٢٥)

Artinya “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat tersebut mengajarkan bahwa dalam menyampaikan pendapat dan membantah perkataan orang lain, harus dilakukan dengan cara yang baik, sopan, tidak melibatkan emosi. Adab berbicara yang tertuang dalam firman

¹⁴¹ Lihat wawancara dengan Masripani (Kepala Sekolah) di Palangkaraya, 9 Februari 2016.

¹⁴² An-Nahl [16]:125.

Allah SWT ini, menegaskan bahwa dalam proses musyawarah, adab berbicara pada saat menyampaikan pendapat perlu dilaksanakan dengan baik agar tidak memancing amarah dari lawan bicara yang menyebabkan meruncingnya permasalahan yang ada.

2. Program Sekolah

Pihak SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya mengupayakan cara lain dalam mengelola konflik yang terjadi, yakni membentuk sebuah program yang menjadi jalan pertemuan antara pihak sekolah, wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Program tersebut adalah terbentuknya komite sekolah.¹⁴³ Tugas dan fungsi komite sekolah tersebut sebagai berikut.

- a. Bersama-sama sekolah membuat rumusan dan penetapan tentang visi dan misi sekolah, standar pelayanan pendidikan di sekolah, menyusun RAPBS, mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- b. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Mengevaluasi program sekolah secara proporsional sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah yang meliputi pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah.
- d. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama pihak sekolah.
- e. Memberikan repon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal.

¹⁴³ Lihat wawancara dengan M.Syahren di Bab IV

- f. Memberikan motivasi, penghargaan kepada tenaga kependidikan atau seseorang yang berjasa kepada sekolah.

Selain melalui upaya-upaya di atas, pihak SMP Islam Nurul Ihsan telah melakukan tahapan-tahapan dalam mengelola sebuah konflik. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut.

- a. Langkah pertama: pengenalan
- b. Langkah kedua: diagnosis
- c. Langkah ketiga: menyepakati suatu solusi
- d. Langkah keempat: pelaksanaan
- e. Langkah kelima: evaluasi¹⁴⁴

Kelima tahapan tersebut akan dipaparkan satu per satu secara rinci seperti berikut.

1. Langkah Pertama: Pengenalan

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen konflik adalah pengenalan. Pengenalan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pengenalan terhadap situasi yang timpang/senjang antara harapan dan keadaan yang sebenarnya. Pada langkah pertama ini, pihak SMP Islam melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengetahui dengan pasti bahwa tujuan sebuah lembaga pendidikan adalah untuk menciptakan generasi muda yang memiliki kualitas dan kuantitas. Demi mewujudkan tujuan tersebut, pihak sekolah harus bisa membuat suasana belajar yang nyaman, tertib, aman dan menyenangkan bagi para peserta didik.
- b. Mendata keadaan di lapangan mengenai suasana belajar di sekolah.

¹⁴⁴ A. Rusdiana. *Manajemen Konflik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.178-179.

- c. Membandingkan hasil pendataan lapangan dengan suasana belajar yang diinginkan, telah sesuai atau tidak.

2. Langkah Kedua: Diagnosis

Pada langkah kedua, yakni diagnosis, pihak sekolah melakukan hal-hal berikut.

- a) Mengelompokkan permasalahan.
- b) Mencari penyebab atau pemicu terjadinya masalah.
- c) Membuat analisis mengenai pengaruh yang ditimbulkan jika permasalahan tersebut tidak ditangani dengan cepat.

3. Langkah Ketiga: Menyepakati Suatu Solusi

Jika pada langkah kedua pihak sekolah mulai mengenali masalah yang muncul, maka pada langkah ketiga, pihak sekolah melakukan hal-hal berikut:

- a) Menghubungi pihak-pihak terkait agar dapat bersama menentukan sikap yang perlu dilakukan dalam menghadapi masalah.
- b) Melakukan musyawarah, saling tukar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait.
- c) Menentukan sebuah solusi bagi konflik yang terjadi.
- d) Menyepakati konflik secara bersama-sama.

4. Langkah Keempat: Pelaksanaan

Setelah pada langkah ketiga pihak sekolah menyepakati sebuah solusi, maka pada langkah keempat dilakukan hal-hal berikut.

- a) Melakukan sosialisasi terhadap seluruh pihak karena yang hadir pada musyawarah tentu tidak seluruh warga, melainkan perwakilan masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat warga.
- b) Sosialisasi dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan. Sosialisasi secara lisan dilakukan melalui pemberitahuan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pejabat warga. Sosialisasi melalui tulisan diwujudkan misalnya melalui spanduk yang dipasang di tempat-tempat tertentu berkaitan dengan hasil musyawarah.

5. Langkah Kelima: Evaluasi

Setelah melakukan empat tahapan di atas, tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan pihak SMP Islam Nurul Ihsan dengan tujuan mengetahui sejauh mana konflik yang ada dapat teratasi. Jika ternyata konflik belum juga reda, maka pihak sekolah dapat kembali pada langkah pertama, yakni mengenali kembali konflik yang muncul, kemudian menemukan masalah, menetapkan solusi dari masalah yang muncul sebagai imbas dari solusi terdahulu kemudian melaksanakan hasil musyawarah tersebut sebagai resolusi dari konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis kebijakan sekolah sehingga menimbulkan konflik adalah kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, yaitu: penutupan akses jalan yang melalui halaman SMP Islam Nurul Ihsan; pelarangan penggunaan halaman sekolah secara umum untuk parkir dan bermain anak-anak; dan pembuatan batas lahan yang dimiliki sekolah dengan yang dimiliki masyarakat.
2. Masyarakat yang setuju terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan berdasarkan pada kesadaran bahwa kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya dari pihak sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bahkan merugikan sekolah dan peserta didik. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab oleh pihak sekolah terhadap peserta didik dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan tertib. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakan pimpinan sekolah dalam mengembangkan SMP Islam Nurul Ihsan merupakan sekelompok orang yang merasa terganggu karena kebijakan tersebut telah menjadi aktifitas yang biasa mereka lakukan.
3. Resolusi konflik dalam mei 123 SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dan lingkungannya, melalui .../a berikut.

- a. Musyawarah yang dilakukan antara pimpinan sekolah dan guru-guru serta seluruh perangkat sekolah dan antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar.
- b. Membentuk dan mengaktifkan program sekolah seperti komite sekolah yang menjadi sarana komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua/wali serta masyarakat sekitar.

B. Rekomendasi

1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangkaraya, seyogyanya perlu lebih memberikan perhatian dan arahan terkait dengan penanganan konflik yang muncul antara pihak sekolah dan masyarakat sekitar.
2. Kepada tokoh masyarakat, Ketua RT. 05 dan RW. VI, seyogyanya dapat memberikan dukungan kepada pihak lembaga pendidikan SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya dalam mengembangkan pendidikan dan menjalankan segala kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan sekolah.
3. Kepada Kepala SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, seyogyanya:
 - a. dapat terus meningkatkan pola manajemen sekolah termasuk salah satunya dalam hal membuat kebijakan dengan mempertimbangkan dampak apa yang akan terjadi setelah kebijakan tersebut dibuat.
 - b. Melakukan pendekatan dan silaturahmi kepada warga masyarakat sehingga dapat bertukarpikiran apabila terjadi permasalahan agar dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan

yang terjadi di sekolah yang berhubungan dengan kepentingan warga masyarakat.

- c. Berupaya menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan sekolah, seperti kegiatan hari-hari besar keagamaan (Qurban, Maulidurrasul,dll)
4. Kepada dewan guru SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya, seyogyanya bisa mendukung segala kebijakan sekolah dengan ikut membantu semua program yang diterapkan di sekolah demi terwujudnya tujuan sekolah yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang Press. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Aziz, Akhmad. *Pola Penyelesaian Masalah Internal Di Sekolah (Studi Kasus Pada SMA Negeri Dan SMA Swasta di Kabupaten Wonosobo)*, Wonosobo. 2010.
- Bodgan, Robert dan Steven J. Tylor. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*. Ed. Afandi, A. Khozin, Surabaya: Usaha Nasional. 1993.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan. *Panduan Manajemen Sekolah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum. 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Hendricks, William. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- <https://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-sarana-dan-prasarana-pendidikan/> diakses pada hari Senin, 3 Oktober 2016, Pukul 10.25 WIB.
- <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/07/pedoman-pendirian-sd-smp-sma-dan-smk.html>. diunduh pada hari Rabu, 5 Oktober 2016, Pukul 15.17 WIB.
- http://jurnal.sdm.blogspot.com/2014/04/manajemen_konflik_definisi-ciri-sumber.html. Diunduh pada 16 September 2015. Pukul 1.02 WIB.
- http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr.Sumaryanto.mkes/6-Manajemen_konflik_sebagai_salah_satu_solusi_dalam_pemecahan_masalah-2, diunduh pada 2 Januari 2015.

<http://teoribagus.com/lingkungan-pembelajaran-yang-kondusif> diunduh pada hari Selasa, 4 Oktober 2016, Pukul 12.17 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html> Senin, 3 Oktober 2016, pukul 8.45 WIB.

Isparwanto. *Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik di Sekolah Dasar* (Studi Kasus pada 4 SDN di Kabupaten Banyuwangi), Banyuwangi. 2012.

Kartodirejo, Sartono. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Grafindo. 1986.

Milles, Matthew B. dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press. 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.

Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Erlangga. 2007.

Riyatno, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC. 2001.

Rohiat. *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama. 2010.

Rusdiana, A. *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.

Robbins, Stephen P., Timothy. Judge. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012.

Saputra, Yudha M. *Pengembangan Kegiatan KoEkstrakurikuler*. Jakarta: Depdikbud, 1998.

Satori, Djam'an dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2010.

- Sudjana, Nana. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production. 2004.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2010.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Suprayogo dan Thobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Syarah, Erie Siti dalam <https://paudfip.wordpress.com/2009/06/17/peranan-keluargasekolah-dan-masyarakat-dalam-pendidikan-anak/> diunduh pada hari Rabu, 5 Oktober 2016. Pukul 20.15 WIB.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa G. A Ticoalu; Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 1: Ilmu Pendidikan Teoritis*. Bandung: Imperial Bakti Utama. 2009.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: IMTIMA. 2010.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Utsman, Sabian. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Wariso. *Pengelolaan Konflik Kinerja Guru (Studi Kasus SMP Negeri 7 Klaten)*. Surakarta. 2013.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Zanwir, *Upaya Menciptakan Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Efektif dalam Pembelajaran: Peningkatan kinerja Kepala Sekolah dalam Program MBS* (dalam <http://bdkpadang.kemenag.go.id>.) diakses hari Senin, 3 Oktober 2016, Pukul 09.15 WIB.